

Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 866 TAHUN XX, 16 - 22 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

400 Ton Sampah Deli Serdang Bakal Diolah Jadi Listrik

Menko Pangan Dorong PSEL Medan Raya Dipercepat

Medan, Jaya Pos

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya. Fasilitas ini nantinya akan mengolah sampah dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan menjadi energi listrik.

Dorongan tersebut disampaikan Zulkifli saat men-

▸▸ Halaman 5



Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat meninjau lokasi rencana pembangunan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kota Medan, bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.(Foto Rd)

Terungkap, Dua Terduga Pelaku Curanmor di Gondang Trenggalek Residivis Kambuhan

Trenggalek, Jaya Pos

Terungkap, kedua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek merupakan residivis.

Masing-masing pernah punya riwayat mendekam dipenjara karena terlibat tindak pidana berulang.

Yakni, MRA (22) yang sudah beberapa kali keluar

▸▸ Halaman 5



Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya menunjukkan barang bukti tindak pidana (JP/HWi)

SEJARAH WAPRES RI: HATTA MUNDUR, SULTAN MENOLAK, GIBRAN BERHENTI



Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan terkait pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming. (Foto: ist)

> Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada November 2026. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada sejarah dua wapres sebelumnya, Mohammad Hatta yang mengundurkan diri pada 1956 dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menolak dicalonkan kembali pada 1978. Meski sama-sama tidak melanjutkan jabatan, ketiganya memiliki alasan dan proses yang berbeda.

Jakarta, Jaya Pos

Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026. Keputusan tersebut menambah catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, Mohammad Hatta pernah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956. Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memilih tidak bersedia dicalonkan kembali pada 1978.

Meski sama-sama mengakhiri atau tidak melanjutkan

▸▸ Halaman 5

PWI Babel Protes Labeling Hoaks oleh Humas Polda, Ancam Boikot Pemberitaan hingga Persoalan Tuntas

Pangkalpinang, Jaya Pos

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat keberatan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait unggahan akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka yang memberikan label "HOAX" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI" terhadap sejumlah pemberitaan media online.

Keberatan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Ketua PWI Babel Mohammad Fathurrahkman dan Sekretaris Fakhruddin Halim itu menyoroti unggahan tangkapan layar sejumlah berita yang dipublikasikan melalui akun Instagram @humas_poldakep.babel dan dikolaborasikan dengan akun @humas_polresbangka pada 9 November 2026.

PWI Babel menilai pelabelan tersebut berpotensi mendiskreditkan karya jurnalistik dan menimbulkan persoalan serius terhadap kebebasan pers.

Dalam suratnya, PWI menegaskan bahwa pemberitaan yang ditampilkan dalam unggahan tersebut merupakan produk jurnalistik yang diproses melalui mekanisme kerja pers, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi kepada publik.

PWI juga menyatakan bahwa

▸▸ Halaman 5



Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat keberatan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. (Humas PWI Babel)

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan,

Bupati Vandiko Siap Optimalkan Peluang Investasi di Samosir

Samosir, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut positif peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilengkapi aplikasi SimPONI Sumut. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah akses informasi investasi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di daerah.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan, pemerintah daerah siap memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengoptimalkan potensi unggulan Kabupaten Samosir, terutama di sektor pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Desk Investasi Wilayah Sumatera diresmikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI Todotua Pasaribu bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (9/11/2026).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Desk Investasi antara

▸▸ Halaman 5



Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI Todotua Pasaribu (tengah) bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution (kanan) serta Bupati Samosir Vandiko (kiri) saat wawancara usai meresmikan Desk Investasi di wilayah Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (9/11). (Foto/Diskominfo)



Pengacara Amir Kadir baju ungu.(Foto Amir)

Sengketa Tanah 7.200 Meter Persegi di Jalan Alauddin Makassar Bergulir ke Pengadilan

Makassar Jaya Pos

Sengketa tanah seluas 7.200 meter persegi atau 72 are di Jalan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Gugatan tersebut diajukan ahli waris Abd. Jabar Krg Kilo dan terdaftar dengan Nomor Perkara 543/Pdt.G/2026/PN Mks. Penggugat mengklaim tanah yang disengketakan merupakan warisan dari almarhum Abu Sele alias Abu Krg Sele.

Dalam gugatannya, ahli waris menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait berdirinya sejumlah bangunan di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga.

Pihak yang digugat adalah Lapas Gunung Sari Kelas I A sebagai Tergugat I dan Kemenkumham Imigrasi sebagai Tergugat II. Sementara itu, BPN Kota Makassar ditempatkan sebagai Turut Tergugat III.

Perkara ini didampingi kuasa hukum penggugat, Pontianus Apa Rume Krowin, S.H., M.H.

Pihak penggugat menyebut memiliki dasar dokumen untuk mengklaim kepemilikan tanah seluas 72 are tersebut. Salah satu dokumen yang dijadikan dasar adalah Buku F/C1 atas nama Abu Sele, Persil 8 SII Kohir 319 CI.

Selain itu, penggugat juga mengantongi Surat Keterangan Lu-

▸▸ Halaman 5

Peringati Hari Pahlawan, Kapolres Trenggalek: Kokohkan Semangat Persatuan

Trenggalek, Jaya Pos

Turut memperingati Hari Pahlawan, digelar upacara bersama di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Pemkab Trenggalek pada Selasa 10 November 2026.

Diikuti ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Basarnas, Korpri, Tagana, hingga Mahasiswa dan pelajar, kegiatan berlangsung khidmat.

Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, perwira upacara dipercayakan kepada Kompol Sudaroini dengan komandan upacara diemban oleh AKP Siswanto.

Dalam amanatnya, AKBP Rizky menyampaikan, jika peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab kita dalam mengisi kemerdekaan.

"Perjuangan itu lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi," sebutnya.

Berangkat dari semangat itu, lanjut Kapolres, menjadi dasar tema Hari Pahlawan Tahun 2026. Yakni, 'Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan'.



Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya jadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha. (JP/HWi)

Tema ini mengajak untuk melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bangsa.

Tantangan zaman terus berubah, perjuangan akan menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat. Serta, upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat. "Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian, di mana pun berada dan apa pun profesi yang dijalankan," tandas AKBP Rizky.

Dirinya pun mengajak seluruh elemen untuk terus meneladani semangat para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Kepahlawanan tumbuh dari kesediaan untuk memberikan manfaat dan mengambil bagian dalam kebaikan bersama.

Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial.

"Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. **(HWi)**

Kemnaker Apresiasi Program Poliran Polda Jabar untuk Atasi Pengangguran



Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dalam peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, di Bandung, Rabu (11/11/2026). (foto Humas Kemenaker)

Bandung Jaya Pos

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi inisiatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Menurutnya, program ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan institusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Dalam acara tersebut, Yassierli mengapresiasi inisiatif program Poliran yang dinilainya berkontribusi nyata mendukung pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang solid dan inklusif. Menurutnya, upaya mengatasi pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih optimal.

"Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik," ujar Yassierli.

Yassierli menyebutkan bahwa kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan berbagai institusi turut mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024, kemudian turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan.

Bagi para lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi juga diharapkan dapat terus mengasah kompetensi agar memiliki peluang lebih besar memasuki pasar kerja. Dalam hal ini, Kemnaker telah menyiapkan berbagai program pelatihan vokasi untuk membantu meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

Atas kehadiran progeam ini, Yassierli berharap para pencari kerja memperoleh kesempatan memasuki pasar kerja tanpa diskriminasi. Ia meminta perusahaan agar menerapkan persyaratan rekrutmen yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan berfokus pada kompetensi calon tenaga kerja.

"Semoga program Polisi Peduli Pengangguran dapat hadir bersama kita semua membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan," kata Yassierli. **(red)**

Bupati Sukabumi Ajak Generasi Muda Lestarikan Bahasa dan Budaya Sunda Lewat Teknologi



Bupati Sukabumi H Asep Japar Dalam Acara Tunas Bahasa Indung di SD Model Cikembar. (Foto/Ist)

Sukabumi, Jay Pos

Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus melestarikan dan mengembangkan bahasa serta budaya Sunda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi harus menjadi peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sunda kepada masyarakat luas. Salah satunya melalui berbagai kreasi dan karya berbahasa Sunda yang dipublikasikan di media sosial maupun platform digital lainnya.

Ajakan tersebut disampaikan Asep Japar saat membuka Festival Tunas Bahasa Indung (FTBI) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 di Aula SMP Negeri Model Cikembar, Kamis (12/11/2026).

Bupati mengapresiasi penyelenggaraan FTBI sebagai bentuk nyata komitmen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian bahasa serta budaya Sunda.

Ia menegaskan, bahasa Sunda bukan sekadar alat komunikasi, melainkan warisan budaya sekaligus identitas masyarakat yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Bahasa Sunda bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga warisan dan jati diri masyarakat. Di dalamnya terkandung nilai kesopanan, tata krama, sikap saling menghormati, serta kearifan lokal. Karena itu, mengembangkan bahasa Sunda merupakan tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Asep Japar berharap FTBI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau perlombaan tahunan, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pembinaan, pembelajaran, serta penerapan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa Sunda di tengah perkembangan zaman.

"Jangan malu menggunakan bahasa Sunda. Jadilah pelaku aktif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda. Manfaatkan teknologi untuk memperkenalkan bahasa dan budaya kita agar semakin dikenal luas," ajaknya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program pelestarian dan pengembangan bahasa Sunda. Namun, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar bahasa Sunda tetap hidup dan berkembang. "Kita harus terus bersinergi untuk mengembangkan bahasa Sunda sebagai bahasa indung atau bahasa ibu," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, mengatakan FTBI bukan sekadar ajang perlombaan menggunakan bahasa Sunda, melainkan bagian dari gerakan bersama untuk menjaga dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana mendorong generasi muda agar lebih kreatif, mencintai bahasa daerah, serta membiasakan penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong generasi muda untuk terus berkreasi dan menggunakan bahasa Sunda, sehingga keberadaannya tetap terjaga dan tidak tergerus perkembangan zaman," ujarnya.

FTBI Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 diikuti para pelajar tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Sejumlah cabang lomba digelar, di antaranya menulis cerpen berbahasa Sunda, mendongeng, membaca sajak, serta menulis dan membaca aksara Sunda.

Melalui festival ini, diharapkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan budaya Sunda semakin tumbuh, sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan budaya daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. **(Yudi)**

Setujui Dua Raperda Non-APBD Tahun 2026, DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke-4

Pasuruan, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan kembali menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda persetujuan dan penetapan dua produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026. Rapat istimewa tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil registrasi Sekretariat DPRD, dari total 50 anggota dewan, sebanyak 37 anggota hadir mengikuti rapat.

Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan telah memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Pasuruan. Agenda persetujuan dua Raperda Non-APBD ini menjadi bagian dari komitmen DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Pasuruan, khususnya Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas pembahasan serta kerja sama yang telah dilakukan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap rancangan produk hukum daerah tersebut.

Bupati juga menegaskan bahwa penyaluran dana penyertaan modal akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang telah dirancang dengan prinsip keadilan, sehingga tidak sampai membebani masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan memperkuat sinergi kebijakan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.**(Wio)**



Suasana Rapat Paripurna ke-4 yang di gelar DPRD Kabupaten Pasuruan. (Foto : Japos. Co)

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Program Poliran Polres Sukabumi Dorang Akses Lapangan Kerja



Kapolres Sukabumi AKBP Beny Cahyadi Dalam Acara Peluncuran Program Poliran. (Foto: Ist)

Sukabumi, Jaya Pos

Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) Polres Sukabumi mendorong terbukanya akses lowongan kerja sekaligus memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan dan bebas pungutan liar (pungli).

Program tersebut diluncurkan bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Bandung. Kegiatan ini diikuti secara daring dari Aula Mapolres Sukabumi, Rabu (11/11/2026).

Sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi turut membuka peluang kerja, di antaranya PT Sun Suka Abadi, Gunung Salak, Dasan Pan Pacific Indonesia, Lidya Sola Gracia, Asaba Land, dan Busana Indah Global. Sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) juga dilibatkan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja.

Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi mengatakan, Poliran menjadi bentuk kepedulian kepolisian dalam membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan.

Kapolres menegaskan, masyarakat maupun perusahaan dapat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli), permainan rekrutmen, atau intervensi yang merugikan.

Kapolres menambahkan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperluas informasi lowongan kerja. "Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menyambut baik program Poliran yang digagas Polri. Menurutnya, program ini dapat menjadi solusi atas keluhan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

H Andreas juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama dinas terkait untuk memperkuat koordinasi dengan kepolisian.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, menyatakan pihaknya siap mendukung program Poliran. Lantas, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Suhendar mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi saat ini turun dari 7,2 persen menjadi 7,11 persen. Capaian tersebut diharapkan terus membaik dengan target penurunan hingga 6 persen pada 2027. **(Yudi)**

Gerakan Pangan Murah Digelar Dua Hari di Bukittinggi, Bantu Warga Dapatkan Sembako dengan Harga Terjangkau



Bukittinggi, Suasana Gerakan Pangan Murah di Pasar Bawah Bukittinggi, Dengn Aktifitas Masyarakat Membeli Kebutuhan Pokok.(Foto: Miss)

Bukittinggi, Jaya Pos

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menghadirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2026 untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut dipusatkan di Petak Ikabe Pasar Bawah, tepatnya di depan Sektor Pemadam Kebakaran (Damkar), Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS), Kota Bukittinggi.

Gerakan Pangan Murah dibuka mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan membeli berbagai komoditas pangan dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan harga di pasaran.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama ketika harga sejumlah bahan pokok berpotensi mengalami perubahan.

Selain membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, GPM juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun, keberhasilan program pangan murah tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan, tetapi juga dari keterjangkauan harga, ketersediaan stok, serta pemerataan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

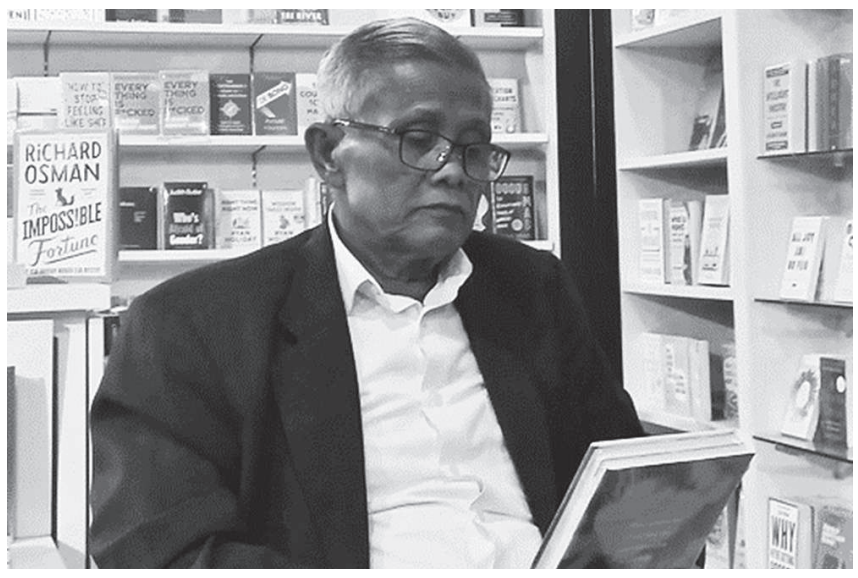
Masyarakat diimbau memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersahabat.

Melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau, aman, dan berkualitas. **(Ms)**

Jelang 72 Tahun Masi Haus Ilmu

Mupakat Bulat Adalah Pembuluh Darah Parsadaan, Bukan Win-Loss, Melainkan Win-Win

Oleh:
Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang



Pagi ini, dari Villa Trinity, Lembang, Jawa Barat, saya kembali merenungkan perjalanan hidup. Ingatan saya tertuju pada sebuah foto ketika berdiri di antara rak-rak buku di sebuah toko buku. Bukan di ladang, bukan di kantor, bukan pula di atas podium, melainkan di tengah hamparan ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam lembaran-lembaran buku.

Di usia yang menjelang 72 tahun, saya masih menikmati kegiatan membaca, membuka buku, mencari referensi, dan mempelajari berbagai hal baru. Rambut memang semakin memutih, kacamata semakin tebal, tetapi rasa haus terhadap ilmu pengetahuan tidak pernah mengenal usia.

Ada yang mungkin bertanya, "Untuk apa lagi belajar pada usia yang sudah mendekati 72 tahun, Amang?"

Jawaban saya sederhana: Karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajar, maka manusia tidak boleh berhenti belajar.

Bagi saya, usia boleh bertambah, tenaga boleh berkurang, tetapi semangat untuk memperkaya pengetahuan harus tetap menyala. Sebab, berhenti belajar sama artinya dengan membiarkan diri tertinggal oleh perubahan zaman.

1. ERA DIGITAL DAN POSTMODERN: JANGAN SAMPAI MENJADI PENONTON DI ZAMAN SENDIRI

Kita sedang hidup dalam era digital dan postmodern yang ditandai dengan perubahan begitu cepat. Teknologi informasi, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), internet, dan media sosial telah mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi, bekerja, bahkan membangun peradaban.

Anak-anak dan cucu-cucu kita tumbuh bersama teknologi. Informasi berada dalam genggaman mereka. Sementara itu, sebagian orang tua masih berjuang memahami perubahan yang berlangsung setiap hari.

Jika generasi tua berhenti belajar, kita berisiko menjadi penonton di tengah perkembangan zaman yang justru sedang membentuk masa depan anak dan cucu kita. Kita bisa tertinggal, mudah terpengaruh informasi palsu (hoaks), gampang diadu domba, bahkan kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dan manipulasi.

Orang Batak memiliki kearifan yang mengingatkan kita bahwa ketika seseorang tidak lagi mengikuti perkembangan keadaan, ia akan kehilangan kemampuan memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

Dalam konteks sekarang, belajar bukan lagi semata-mata urusan memperoleh ijazah atau gelar akademik. Belajar adalah kebutuhan untuk mempertahankan daya pikir, memperluas wawasan, dan menjaga martabat manusia agar tidak diperdaya oleh perubahan zaman.

Saya mempelajari dunia digital bukan karena ingin menjadi anak muda. Saya belajar karena tidak ingin warisan Batakologi yang selama ini saya tekuni dan perjuangkan terputus hanya karena saya tidak mampu menyampaikannya melalui bahasa dan teknologi yang dipahami generasi digital.

Kita harus menyadari bahwa era postmodern juga menghadirkan tantangan baru. Setiap orang dapat berbicara, menyebarkan informasi, bahkan membangun narasi dan versi sejarahnya sendiri. Tidak semua informasi benar, tidak semua pendapat memiliki dasar, dan tidak semua yang viral layak dipercaya.

Dahulu, buku menjadi salah satu penjaga pengetahuan dan dokumentasi sejarah. Sekarang, ketika informasi begitu mudah diproduksi dan disebarluaskan, kebenaran justru membutuhkan manusia yang mau membaca, meneliti, membandingkan, dan berpikir kritis.

Itulah sebabnya, pada usia menjelang 72 tahun, saya masih senang berada di toko buku. Buku mengajarkan kesabaran, ketelitian, kedalaman berpikir, dan kebijaksanaan untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar.

Teknologi boleh semakin canggih, tetapi kemampuan berpikir kritis tidak boleh ditinggalkan.

2.HATI TERIRIS MELIHAT PENDIDIKAN SEOLAH-OLAH TIDAK PENTING DALAM KEPEMIMPINAN

Namun, di balik perenungan tentang pentingnya belajar, ada sesuatu yang mengusik hati saya.

Saya mendengar adanya pandangan dalam suatu komunitas bahwa persyaratan pendidikan tidak perlu menjadi pertimbangan dalam kepemimpinan organisasi, baik pada tingkat sektor, cabang, wilayah, maupun kepengurusan pusat.

Saya tidak bermaksud merendahkan siapa pun. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki gelar akademik tidak mampu menjadi pemimpin. Tidak demikian.

Akan tetapi, saya merasa perlu mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana kita dapat mempersiapkan kepemimpinan organisasi yang mampu menjawab tantangan zaman apabila proses belajar dan pengembangan kapasitas justru dianggap tidak penting?

Bagaimana mungkin kita mengelola organisasi besar yang anggotanya terdiri atas berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari sarjana, magister, doktor hingga profesor, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap wawasan, pengetahuan, dan kemampuan manajerial para pemimpinnya?

Memimpin organisasi bukan sekadar berani berbicara, memiliki banyak pendukung, populer, atau pandai memenangkan dukungan dalam forum. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan memahami persoalan, membaca perkembangan zaman, menyerap aspirasi, mengelola perbedaan, menyusun kebijakan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kebijaksanaan. Gelar akademik juga bukan jaminan seseorang memiliki integritas, karakter, dan kemampuan memimpin.

Namun, pendidikan, pengalaman, kemauan belajar, dan kemampuan berpikir harus ditempatkan sebagai modal penting dalam membangun kepemimpinan.

Yang perlu kita persoalkan bukan semata-mata tinggi atau rendahnya gelar seseorang, melainkan apakah seorang calon pemimpin memiliki kapasitas, integritas, wawasan, dan kemauan untuk terus belajar.

Justru karena itu, saya merasa teriris ketika ada orang yang ingin memimpin, tetapi pada saat bersamaan menganggap pendidikan dan proses peningkatan pengetahuan bukan sesuatu yang penting.

Saya sendiri, menjelang usia 72 tahun, masih merasa perlu membaca dan belajar. Lantas, mengapa mereka yang masih muda, memiliki tenaga, kesempatan, dan waktu yang lebih panjang justru tidak menjadikan belajar sebagai kebutuhan?

Jangan sampai organisasi besar memiliki cita-cita besar, tetapi mengabaikan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. HAKEKAT MUSYAWARAH: BUKAN WIN-LOSS, MELAINKAN WIN-WIN

Dari kegelisahan tersebut, pikiran saya kemudian tertuju pada hakikat musyawarah dan mupakat bulat dalam Mubes Parsadaan Pomparan Toga Sinaga.

Kita harus memahami bahwa musyawarah dalam sebuah organisasi genealogis atau organisasi kekerabatan tidak boleh disamakan begitu saja dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan.

Mubes bukan arena untuk membuktikan siapa paling kuat, siapa paling banyak pendukung, atau kelompok mana yang berhasil menundukkan kelompok lainnya.

Dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga, kita memiliki ikatan yang jauh lebih mendasar daripada kepentingan jabatan. Kita terikat oleh darah, sejarah, silsilah, persaudaraan, dan tanggung jawab menjaga warisan leluhur.

Karena itu, hasil musyawarah seharusnya tidak melahirkan pihak yang merasa menang dan pihak lain yang merasa dikalahkan. Ada empat kemungkinan hasil dalam setiap proses pengambilan keputusan:

Pertama, WIN-LOSS: Saya Menang, Engkau Kalah. Ini merupakan pola pertarungan yang menempatkan kemenangan satu kelompok di atas kekalahan kelompok lain. Dalam mekanisme pemungutan suara, kelompok mayoritas mungkin berhasil memenangkan keputusan. Namun, apabila kelompok minoritas dipermalukan, diabaikan, atau disingkirkan, kemenangan tersebut menyisakan persoalan persaudaraan.

Secara suara mungkin menang, tetapi secara kekeluargaan belum tentu berhasil.

Kedua, LOSS-WIN: Saya Kalah, Engkau Menang. Kondisi ini terjadi ketika seseorang atau kelompok terpaksa mengalah bukan karena kesadaran dan keikhlasan, melainkan karena tekanan, intimidasi, atau situasi yang tidak memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat.

Mereka mungkin diam di dalam forum, tetapi belum tentu menerima keputusan dengan hati yang lapang. Kekecewaan yang tidak diselesaikan dapat menjadi persoalan laten dan mengganggu hubungan persaudaraan di kemudian hari.

Kita tentu tidak ingin pengalaman konflik dalam sebuah perkumpulan, ketika perbedaan pendapat berujung pada tindakan emosional seperti menendang kursi hingga berserakan, terulang kembali akibat pemaksaan kehendak.

Ketiga, LOSS-LOSS: Sama-Sama Kalah. Inilah keadaan yang harus dihindari. Ketika masing-masing kelompok mempertahankan ego, tidak mau mendengar, dan tidak bersedia mencari titik temu, Mubes dapat berakhir tanpa keputusan yang diterima bersama.

Organisasi terbelah, hubungan persaudaraan merenggang, aturan organisasi berpotensi dilanggar, bahkan AD dan ART dapat kehilangan kewibawaannya.Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Semua pihak dirugikan dan Parsadaan menjadi korban.

Keempat, WIN-WIN: Kita Sama-Sama Menang.Inilah tujuan ideal musyawarah dan mupakat bulat. Win-Win bukan berarti setiap orang harus mendapatkan jabatan atau semua keinginan harus dipenuhi. Win-Win berarti setiap pihak memperoleh ruang untuk didengar, dihargai, dan diperlakukan secara adil.

Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Dalam Win-Win, tidak ada pihak yang dipermalukan, tidak ada saudara yang disingkirkan, dan tidak ada kelompok yang dianggap tidak penting.Semua tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pomparan Toga Sinaga.

Sebab, kemenangan terbesar dalam Mubes bukanlah keberhasilan memenangkan perebutan jabatan, melainkan keberhasilan menjaga keutuhan persaudaraan.

4. MUPAKAT BULAT ADALAH PEMBULUH DARAH PARSADAAN

Saya ingin mengibaratkan Mupakat Bulat sebagai sistem pembuluh darah dalam tubuh manusia.

Mengapa?

Karena sebuah organisasi kekerabatan juga memiliki sistem kehidupan yang harus dijaga agar seluruh bagiannya tetap terhubung dan berfungsi dengan baik.

Dalam analogi ini, Toga Sinaga adalah jantung sebagai sumber ikatan genealogis dan persaudaraan. Jantung memompa darah agar seluruh bagian tubuh memperoleh kehidupan.

Mubes dan Pengurus Pusat dapat diibaratkan sebagai bagian dari sistem arteri yang menyalurkan keputusan, arah kebijakan, dan hasil kesepakatan kepada seluruh bagian organisasi.

Sektor, cabang, dan wilayah merupakan bagian dari sistem vena yang membawa kembali aspirasi, masukan, persoalan, serta kebutuhan anggota dari bawah kepada pusat organisasi.

Sementara itu, keluarga-keluarga dan rumah tangga Pomparan merupakan kapiler. Ukurannya kecil dan sering tidak terlihat dalam struktur organisasi, tetapi justru menjadi tempat kehidupan persaudaraan berlangsung secara nyata.

Dari analogi tersebut, kita dapat memahami bahwa komunikasi dan pengambilan keputusan tidak boleh hanya berjalan satu arah.

Keputusan dari pusat harus sampai kepada seluruh anggota. Sebaliknya, aspirasi dari keluarga, sektor, cabang, dan wilayah harus dapat kembali ke pusat untuk didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti.

Dengan demikian, Mupakat Bulat merupakan sistem sirkulasi kehidupan organisasi.

Aliran aspirasi dan keputusan harus berlangsung secara sehat, terbuka, jernih, dan berkesinambungan. Jangan sampai tersumbat oleh ego, ambisi pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan politik praktis, seperti Pileg dan Pilkada.

Jika satu bagian organisasi tersumbat oleh kepentingan tertentu, maka bagian lainnya akan ikut merasakan dampaknya.

Dalam tubuh manusia, penyumbatan pembuluh darah dapat menimbulkan penyakit serius, termasuk stroke. Dalam organisasi, pemaksaan kehendak dan tertutupnya saluran aspirasi dapat menimbulkan apa yang saya sebut sebagai stroke organisatoris.

Organisasi masih memiliki nama, struktur, pengurus, dan kegiatan, tetapi komunikasi serta kepercayaan di antara anggotanya mulai terputus.

Inilah yang harus kita cegah. Saya ingin menegaskan satu prinsip:

Demokrasi liberal sering menggunakan prinsip mayoritas untuk menetapkan keputusan. Dalam mekanisme pemungutan suara, 51 dapat mengalahkan 49.

Namun, dalam demokrasi genealogis Parsadaan Pomparan Toga Sinaga, angka 51 dan 49 tidak boleh dibiarkan menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Keduanya harus kembali menjadi 100 sebagai satu kesatuan persaudaraan.

Bukan berarti setiap keputusan harus selalu bulat tanpa perbedaan pendapat. Perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan itu harus dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap AD dan ART, keterbukaan, dan semangat mencari kesepakatan terbaik.

Mupakat Bulat bukan sekadar kesamaan suara, melainkan kesatuan hati setelah melalui proses mendengar, mempertimbangkan, dan menghargai perbedaan.

5.HAUS ILMU ADALAH BENTUK TANGGUNG JAWAB TERHADAP GENERASI PENERUS

Bagi saya, haus akan ilmu pengetahuan bukan persoalan gengsi, gelar, atau keinginan untuk terlihat pintar.

Ini adalah panggilan hidup dan tanggung jawab moral.Saya menekuni penulisan dan pengembangan kearifan lokal Batakologi karena ingin meninggalkan warisan pengetahuan bagi generasi mendatang.

Saya ingin nilai-nilai luhur leluhur, sejarah, falsafah hidup, adat istiadat, serta identitas budaya Batak tidak hanya menjadi cerita lisan yang perlahan-lahan hilang, tetapi terdokumentasi, dikaji, dan dapat dipelajari oleh anak-anak serta cucu-cucu kita.

Namun, bagaimana mungkin saya menulis dan mewariskan pengetahuan apabila saya sendiri berhenti belajar?

Bagaimana mungkin kita meminta generasi muda mencintai budaya leluhurnya jika kita tidak memberikan contoh untuk terus membaca, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan?

Warisan budaya tidak cukup hanya dibanggakan. Warisan itu harus dipahami, dipelihara, dikembangkan, dan diwariskan dengan cara yang relevan terhadap perkembangan zaman.

Karena itu, selagi mata masih mampu membaca, tangan masih sanggup membuka buku, dan pikiran masih dapat menganalisis, saya akan terus belajar. Usia boleh mendekati 72 tahun, tetapi semangat belajar harus tetap 17 tahun. Bukan berarti kita harus kembali muda secara fisik, melainkan menjaga semangat, rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru.

Keadilan tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu dan pengabaian terhadap kelompok lainnya. ***

DPRD Langkat Dorong Perbaikan Jalan Longsor di Desa Namoteras Melalui Dana BTT

Langkat, Jaya Pos

DPRD Kabupaten Langkat mendorong percepatan penanganan jalan longsor di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, dengan mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini dibahas dalam audiensi Perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).

Longsor yang dipicu tingginya curah hujan tersebut mengancam akses transportasi masyarakat setempat. Jalan yang terdampak memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter.

Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, menyampaikan bahwa penanganan darurat perlu segera dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin parah. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah serta warga yang mengangkut hasil bumi.


Ketua DPRD Langkat terima audiensi perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru, (foto/ Humas DPRD Langkat)

Rahman menjelaskan, pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani bencana tersebut. Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta sehingga dinilai belum mencukupi untuk menangani kerusakan jalan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi untuk mempercepat penanganan longsor melalui pemanfaatan dana BTT sesuai ketentuan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Ketua DPRD Kabupaten Langkat melalui koordinasi antar perangkat daerah. **(AN)**

Wali Kota dan Forkopimda Bukittinggi Ziarah ke TMP Kusuma Bhakti, Kenang Jasa Para Pahlawan


Walikota Bukittinggi Ziarah Kekusuma , Mengenang Jasa Pahlawan. (Foto: Miss)

Bukittinggi, Jaya Pos

Wali Kota Bukittinggi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bhakti, Bukittinggi, Kamis (13/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa terima kasih atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Ziarah berlangsung khidmat. Rombongan mengikuti rangkaian prosesi penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pendahulu sekaligus menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, nasionalisme, dan semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran Wali Kota bersama jajaran Forkopimda juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan unsur pimpinan daerah dalam menjaga serta meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa.

Ziarah ke TMP Kusuma Bhakti bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana refleksi bagi generasi penerus agar memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini diraih melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda para pahlawan.

Semangat kepahlawanan tersebut hendaknya diwujudkan melalui pengabdian, kerja nyata, dan kepedulian terhadap masyarakat. Terlebih, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan melalui pembangunan daerah serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Forkopimda mengajak masyarakat untuk terus menghargai jasa para pahlawan, tidak melupakan sejarah, serta menjadikan nilai perjuangan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, menghormati jasa pahlawan bukan hanya dilakukan melalui upacara dan ziarah, tetapi juga dengan meneruskan perjuangan mereka melalui karya, persatuan, dan pengabdian bagi bangsa dan negara. **(Ms)**

TKD Berkurang Rp88,4 Miliar

Pemkab Simalungun Tegaskan Pembahasan APBD 2027 Sesuai Jadwal

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD telah dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan. Sementara itu, penyesuaian anggaran akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) akan dibahas bersama DPRD.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, kepada wartawan di Pamatang Raya, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan itu disampaikan menyusul rencana DPRD Simalungun kembali menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas kelanjutan Ranperda APBD 2027.

Mixnon menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati dan ditandatangani Bupati bersama pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, postur RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,4 triliun. Perhitungan itu menggunakan asumsi alokasi TKD mengacu pada APBD 2026 yang nilainya lebih dari Rp1,9 triliun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemkab Simalungun menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026.

"Ranperda disampaikan pada 4 September karena sesuai ketentuan harus disampaikan paling lambat minggu kedua September. Pembahasan hingga persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah juga memiliki batas waktu sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya," kata Mixnon.



Penyampaian Ranperda APBD 2027 Pemkab Simalungun Sudah Sesuai Degan Tahapan. (Foto/Rd)

Ia menyebutkan, ketentuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Karena itu, pembahasan dan persetujuan bersama APBD 2027 ditargetkan rampung paling lambat 30 November 2026.

Namun, dalam prosesnya, Pemkab Simalungun menerima surat dari Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026 mengenai penetapan alokasi TKD tahun anggaran 2027.

Dalam pemberitahuan tersebut, alokasi TKD untuk Kabupaten Simalungun hanya sekitar Rp1,8 triliun. Angka itu turun lebih dari Rp88,4 miliar dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.

Pengurangan tersebut membuat Pemkab Simalungun harus menyesuaikan rancangan pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2027.

Mixnon menjelaskan, nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati dalam rapat paripurna DPRD pada 10 November 2026 masih menggunakan postur Ranperda APBD sebelum penyesuaian akibat pengurangan TKD.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga telah menyampaikan perlunya penyesuaian anggaran menyusul berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

"Di sinilah tahapan pembahasan selanjutnya harus berjalan. Melalui nota jawaban masing-masing fraksi terhadap nota pengantar keuangan Bupati, persoalan pengurangan TKD ini dapat ditanggapi dan dibahas lebih lanjut bersama DPRD," ujarnya.

Menurut Mixnon, Ranperda APBD 2027 disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama. Karena itu, perubahan terhadap kesepakatan tersebut harus kembali dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD.

"Kenapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian ketika mengetahui adanya pengurangan TKD? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jika kesepakatan itu harus diubah, tentu harus melalui kesepakatan kembali. Itu yang kami sampaikan. Jadi, tidak ada tahapan yang kami langgar," tegasnya.

Ia berharap DPRD dan Pemkab Simalungun segera melanjutkan pembahasan agar penyesuaian anggaran dapat diselesaikan tanpa mengham-bat penetapan APBD 2027.

Sementara itu, Kepala BPKPD Simalungun, Simson Tambunan, menegaskan penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah dilaksanakan sesuai jadwal serta tahapan yang berlaku.

"Kami berharap pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga persetujuan bersama dapat diselesaikan tepat waktu," ujarnya.

Dengan berkurangnya alokasi TKD lebih dari Rp88,4 miliar, penyesuaian APBD 2027 menjadi agenda penting yang harus segera diselesaikan Pemkab Simalungun bersama DPRD. Langkah tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah**.** **(Rd)**

Pemkab Deli Serdang Bakal Perbarui Data Penerima Bansos, 175.052 Keluarga Terima Beras

Medan Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang akan memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Langkah ini dilakukan menyusul adanya laporan warga mampu yang masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan penyaluran bantuan beras di Medan, Senin (9/11/2026).

Asri Ludin mengatakan masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Salah satunya, warga yang tergolong mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Karena itu, Pemkab Deli Serdang mendorong pendataan ulang agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Di Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebanyak 175.052 keluarga menjadi penerima bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026. Masing-masing keluarga akan mendapatkan total 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan.

Menanggapi persoalan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan data penerima bantuan bisa diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian. Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat aktif melaporkan kesalahan data.

"Tadi Pak Bupati bilang, ada warga desil 1 tapi punya mobil. Nah, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi, bisa diperbaiki data. Namanya juga data, yang mendata orang pusat kan, dia enggak lihat," ujar Zulkifli.

Selain menyalurkan bantuan beras kepada 33,2 juta keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

Di Sumatera Utara, pemerintah menyediakan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp13.100 per kilogram.

Pemerintah juga melepas 380 ribu ton beras dengan harga Rp11.000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan industri makanan, termasuk pengrajin kue dan bihun.

Sementara itu, untuk mendukung kebutuhan peternak ayam, pemerintah menyiapkan pasokan jagung sebanyak 100 ribu hingga 150 ribu ton dengan harga Rp5.500 per kilogram.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, bahan baku industri makanan, dan pakan ternak sehingga tidak semakin membebani masyarakat.

(Ramdani)



Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan penyaluran bantuan beras di Medan, Senin (9/11/2026).(Foto Rd)

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Sejarah Wapres RI: Hatta Mundur ..... *Halaman 1*

jabatan wakil presiden, ketiganya memiliki latar belakang dan proses yang berbeda.

Hatta mengundurkan diri ketika masih menjabat. Sultan menyelesaikan masa jabatannya, tetapi menolak dicalonkan kembali. Adapun Gibran menyampaikan pernyataan berhenti atas permintaan sendiri melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI

Berikut perjalanan ketiga tokoh tersebut dalam sejarah jabatan Wakil Presiden Indonesia.

1. Mohammad Hatta Mundur pada 1956

Mohammad Hatta atau Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia mendampingi Presiden Soekarno sejak 18 Agustus 1945 hingga mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956.

Keputusan Hatta mengundurkan diri dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik dengan Soekarno mengenai arah pemerintahan Indonesia.

Hatta mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno semakin mengarah pada konsep Demokrasi Terpimpin.

Selain perbedaan sistem pemerintahan, Hatta juga menilai peran wakil presiden semakin terbatas dalam sistem parlementer karena pemerintahan sehari-hari lebih banyak dijalankan oleh perdana menteri.

Kekecewaan terhadap praktik korupsi yang berkembang saat itu juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya.

Keinginan Hatta mundur sebenarnya sudah disampaikan sebelum 1956. Pada 20 Juli 1956, ia mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono untuk menyampaikan rencana pengunduran dirinya setelah DPR hasil pemilu mulai bekerja dan Konstituante terbentuk.

DPR kemudian membahas dan menyetujui permintaan tersebut pada 30 November 1956. Terhitung sejak 1 Desember 1956, Hatta tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Pemberhentian Hatta kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang ditetapkan pada 5 Februari 1957, dengan masa berlaku sejak 1 Desember 1956.

Pengunduran diri Hatta sekaligus mengakhiri pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dikenal dengan sebutan Dwitunggal.

Meski berbeda pandangan politik, hubungan pribadi keduanya tetap terjaga. Salah satu kisah yang dikenal adalah ketika Soekarno meminta Hatta menjadi wali nikah putranya, Guntur Soekarno Putra.

Pertemuan terakhir keduanya berlangsung pada 19 Juni 1970, dua hari sebelum Soekarno meninggal dunia. Kisah tersebut kemudian dikenang melalui kesaksian Meutia Hatta, putri Bung Hatta.

2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX Menolak Dicalonkan Kembali pada 1978

Berbeda dengan Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak mengundurkan diri ketika masih menjabat sebagai wakil presiden.

Sultan menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1973–1978, mendampingi Presiden Soeharto. Namun, ketika masa jabatannya berakhir, ia menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali untuk periode 1978–1983.

Dalam penjelasannya di hadapan Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1978, Sultan menyampaikan sejumlah pertimbangan atas keputusan tersebut.

Ia menyebut kondisi kesehatan sebagai salah satu alasan. Selain itu, Sultan ingin memberikan pengabdian lebih besar kepada bangsa dan negara tanpa terikat kewajiban resmi yang melekat pada jabatan wakil presiden.

Keputusan tersebut membuat Sultan tidak melanjutkan jabatannya setelah masa tugas berakhir pada 23 Maret 1978.

Posisi wakil presiden kemudian diisi Adam Malik yang terpilih dalam Sidang Umum MPR pada 23 Maret 1978 untuk mendampingi Soeharto.

Di luar alasan resmi tersebut, sejumlah tokoh pernah menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya persoalan politik dalam hubungan Sultan dengan Soeharto.

Salah satunya mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Ia pernah menilai Sultan mengetahui sejumlah tindakan Soeharto yang dianggap tidak benar, tetapi memilih menahan diri.

Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian tokoh dan tidak dapat dipastikan sebagai alasan resmi Sultan menolak dicalonkan kembali.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988. Namanya dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

3. Gibran Rakabuming Raka Menyatakan Berhenti pada 2026

Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024–2029.

Namun, pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat tersebut.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri.

Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, menurut Ahmad Muzani, Gibran tidak menyampaikan alasan khusus secara lisan ketika bertemu pimpinan MPR.

Presiden Prabowo juga membenarkan telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka pada hari yang sama. Prabowo menyatakan menghormati keputusan tersebut.

Polemik Ijazah dan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Pernyataan berhenti Gibran muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikannya.

Persoalan tersebut berkembang setelah adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan serta penyetaraannya.

Polemik itu kemudian mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut pada 11 November 2026.

Usulan HMP itu rencananya diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 November 2026. Namun, rapat paripurna tersebut dibatalkan berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Pembatalan rapat berlangsung pada hari yang sama ketika Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR.

Meski demikian, usulan HMP dan keputusan Gibran berhenti merupakan dua proses kelembagaan yang berbeda.

MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menjelaskan bahwa istilah yang tepat untuk kasus Gibran adalah "berhenti", bukan sekadar mengundurkan diri.

Menurutnya, istilah berhenti sesuai dengan nomenklatur dalam UUD 1945 dan digunakan dalam surat yang disampaikan Gibran kepada MPR.

"Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," kata Taufik, dikutip Antara, Kamis (12/11/2026).

Taufik juga menyampaikan pandangan bahwa Gibran tidak dapat mencabut kembali pernyataan berhentinya setelah surat tersebut disampaikan kepada MPR.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 maupun undang-undang tidak mengatur secara eksplisit kapan masa jabatan berakhir setelah surat pernyataan berhenti diserahkan.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan sejak 12 November 2026.

MPR dijadwalkan menggelar Rapat Gabungan (Ragab) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas tindak lanjut kekosongan jabatan tersebut.

Pembahasan mencakup penjadwalan sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden, pembentukan tim verifikasi, serta tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Sesuai penjelasan Ahmad Muzani, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Tiga Peristiwa, Tiga Latar Belakang Berbeda

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan perbedaan cara berakhirnya jabatan wakil presiden dalam sejarah Indonesia.

Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1956 karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno dan persoalan pemerintahan saat itu.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyelesaikan masa jabatannya pada 1978, tetapi menolak dicalonkan kembali dengan alasan kesehatan dan keinginan mengabdi melalui ruang yang lebih luas.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka pada 2026 menyatakan berhenti atas permintaan sendiri melalui surat resmi kepada Presiden dan MPR RI.

Ketiganya menjadi bagian dari catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menunjukkan bahwa berakhirnya jabatan wakil presiden dapat berlangsung melalui latar belakang dan mekanisme yang berbeda.

(D2)

00 Ton Sampah Deli Serdang ..... *Halaman 1*

injau lokasi rencana pembangunan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kota Medan, bersama Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, Senin (9/11/2026).

Dalam proyek kerja sama lintas daerah tersebut, Kabupaten Deli Serdang akan memasok 400 ton sampah per hari untuk diolah di fasilitas PSEL Medan Raya.

Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi listrik.

Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan PSEL Medan Raya perlu segera dipercepat. Menurutnya, sejumlah proyek serupa di daerah lain sudah memasuki tahap pembangunan dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2028.Menurut Zulkifli, sampah yang dibiarkan menumpuk secara terbuka berpotensi mencemari lingkungan dan aliran sungai. Kondisi tersebut juga dapat memicu kebakaran.

Pemerintah pun menargetkan praktik open dumping dapat dihentikan paling lambat pada 2028. Ia menyebutkan, pembangunan satu fasilitas PSEL diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun. Selain mengurangi timbunan sampah, fasilitas tersebut akan mengolah sampah menjadi energi listrik.

Di luar pembangunan PSEL, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah mulai dari tingkat desa dan kelurahan.

Zulkifli mengungkapkan rencana pemberian dukungan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa dan kelurahan. Dana tersebut direncanakan untuk penyediaan teknologi pengolahan sampah, namun usulannya masih menunggu persetujuan Presiden.

Peninjauan lokasi rencana pembangunan PSEL Medan Raya tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kota Medan. **(Ramdani)**

Terungkap, Dua Terduga Pelaku ..... *Halaman 1*

masuk bui akibat melakukan pencurian di sejumlah kota. Selain Trenggalek, MRA (kini telah ditetapkan tersangka) tercatat juga sempat menjalani hukuman kasus serupa di Sidorajo dan dua TKP di wilayah Ponorogo.

"Sedangkan tersangka lainnya (AS) diketahui pernah tersangkut 3 kali perkara Narkoba dan 2 kali Curanmor. Keseluruhan TKP di wilayah Kabupaten Ponorogo," ujar Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, Kamis 12 November 2026.

Pengungkapan kasus tersebut, lanjut dia, tidak lepas dari keuletan jajaran Satreskrim dalam melakukan penyelidikan yang mendalam. Petugas berupaya menggali peran tiap terduga pelaku agar terang benderang sesuai perbuatannya.

Tersangka MRA adalah laki-laki dengan alamat Asam Rowo, Kota Surabaya namun berdomisli di Jetis, Ponorogo.

Untuk kronologis kejadian, masih kata AKBP Rizky, bermula ketika korban yang memarkir sepeda motor di teras rumahnya di Desa Gondang, Kecamatan Tugu. Meski pagar rumah tertutup dengan engsel terkait, tetapi kunci gembok tidak terkunci.

Sesaat kemudian, kedua tersangka berhenti didepan rumah dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, MRA membuka pagar dan mengambil sepeda motor menggunakan kunci T dan duplikat. Sementara AS, tetap diatas kendaraan dan bertugas mengawasi situasi diluar pagar.

Akan tetapi, untuk kedua tersangka (MRA dan AS) sekarang belum ditahan oleh penyidik Polres Trenggalek. Di karenakan masih menjalani proses hukum di Ponorogo dengan kasus yang sama. **(HWi)**

PWI Babel Protes Labeling Hoaks ..... *Halaman 1*

berita-berita tersebut memiliki narasumber yang jelas serta telah melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait.

Menurut PWI Babel, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mohammad Fathurrakhman menegaskan Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung hendaknya tidak mudah memberikan label atau stempel hoaks terhadap suatu pemberitaan media hanya karena isi berita tersebut dianggap tidak sesuai dengan pandangan atau keterangan pihak kepolisian.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong," katanya, Kamis (12/11/2026).

Fathurrakhman menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Polres Bangka yang langsung dipimpin Kapolres AKBP Indra Feri Dalimunthe sebelumnya merupakan langkah tepat, dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan, dalam konferensi pers.

PWI Babel menyayangkan penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan media tanpa adanya penjelasan atau mekanisme penyelesaian yang transparan.

Organisasi wartawan tersebut mengingatkan bahwa pelabelan terhadap karya jurnalistik berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan dapat menghambat kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

PWI Babel pun mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung agar segera menghapus unggahan yang memuat tangkapan layar pemberitaan tersebut dari akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka guna mencegah polemik semakin meluas.

PWI Babel Nyatakan Boikot Pemberitaan Humas Polda

Tidak hanya menyampaikan keberatan, PWI Babel juga mengambil sikap tegas dengan menyatakan boikot terhadap pemberitaan dari Humas Polda Babel sampai persoalan tersebut diselesaikan secara tuntas.

Sikap ini menjadi bentuk protes organisasi terhadap tindakan yang dinilai dapat merugikan kehormatan dan independensi kerja jurnalistik.

PWI Babel sekaligus mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah mendiskreditkan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Pers, dalam menjalankan fungsinya, memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, ketika terdapat perbedaan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus tetap mengedepankan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini di-publish, surat keberatan PWI Babel tersebut belum disertai tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung mengenai alasan pemberian label "HOAX" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI" terhadap sejumlah pemberitaan tersebut.

Pihak kepolisian diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar penilaian, proses verifikasi informasi, serta pertimbangan di balik publikasi unggahan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam polemik sepihak.

(Red)

Sengketa Tanah 7.200 Meter Persegi ..... *Halaman 1*

rah Gunung Sari Nomor 01/517/593/57/2007 tertanggal 4 Juli 2007. Surat tersebut ditandatangani Lurah Gunung Sari saat itu, Drs. M. Yasin.

Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Buku C, tanah Persil 8 SII Kohir 319 CI tercatat atas nama Abu Sele di wilayah Kampung Gunung Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar.

Atas dasar dokumen itu, para ahl waris menyatakan memiliki hak atas tanah yang kini menjadi objek sengketa. Selain status kepemilikan, penggugat juga mempersoalkan sejumlah bangunan yang disebut berdiri di atas lahan sengketa.

Bangunan tersebut meliputi rumah dinas, tempat pencucian mobil, rumah makan Sari Laut, serta beberapa bangunan lainnya.

Penggugat turut mempertanyakan klaim pihak Lapas yang menyebut lahan tersebut masuk dalam kawasan Hak Guna Bangunan (HGB).

Abd. Jabar Krg Kilo menegaskan, lokasi tanah yang diklaim sebagai warisan keluarganya berada di luar pagar Lapas. "Tanah ini tanah warisan kakek kami, Abu Sele. Sudah tercatat di Buku F/C1 Persil 8 dan disahkan Lurah Gunung Sari tahun 2007. Luasnya 72 are. Namun, di atasnya sudah berdiri rumah dinas, tempat cuci mobil hingga rumah makan," ujarnya.

Ia berharap persoalan batas lahan dan status kepemilikan tanah dapat diperjelas melalui pembuktian dalam persidangan.

Ahli waris juga meminta BPN Kota Makassar membuka dokumen pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.

Permintaan tersebut ditujukan kepada BPN sebagai Turut Tergugat III agar memberikan keterangan secara profesional, netral, dan transparan.

Dokumen yang diminta diperlihatkan antara lain peta blok, peta bidang, serta data Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan lahan tersebut.

Menurut penggugat, keterbukaan dokumen diperlukan untuk memastikan batas HGB yang diklaim pihak Lapas sekaligus mengetahui posisi tanah Persil 8 Kohir 319 CI seluas 72 are. "Kami tidak meminta BPN memihak kepada kami. Kami hanya meminta BPN profesional dan terbuka sesuai peta blok yang dikeluarkan sendiri oleh BPN," kata Abd. Jabar. "Buka petanya, tunjukkan batas HGB Lapas sampai di mana dan tunjukkan posisi tanah Persil 8 Kohir 319 CI seluas 72 are milik kami. Kebenaran harus terlihat dari data dan peta yang sebenarnya," lanjutnya.

Ahli waris berharap dokumen dan keterangan resmi BPN dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Dalam petitum gugatan, ahli waris mengajukan enam tuntutan kepada majelis hakim PN Makassar.

Pertama, meminta hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, meminta tanah seluas 72 are di Jalan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, yang tercatat sebagai Persil 8 Kohir 319 CI atas nama Abu Sele, dinyatakan sebagai hak penggugat selaku ahli waris yang sah.

Ketiga, meminta HGB yang diklaim Tergugat I dinyatakan tidak berlaku terhadap objek tanah yang disengketakan.

Keempat, meminta para tergugat menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di atas lahan tersebut.

Kelima, meminta para tergugat mengosongkan tanah dan menyerahkannya kembali kepada penggugat dalam keadaan kosong.

Keenam, meminta BPN Kota Makassar membuka peta blok, peta bidang, serta data HGB terkait objek sengketa dalam persidangan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Lapas Gunung Sari, Kemenkumham Imigrasi, dan BPN Kota Makassar belum berhasil dimintai tanggapan terkait gugatan tersebut.

Perlu ditegaskan, seluruh klaim kepemilikan dan dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini masih merupakan dalil pihak penggugat yang harus dibuktikan di persidangan.

Penentuan status kepemilikan tanah serta terbukti atau tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PN Makassar.**(Hk)**

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan..... *Halaman 1*

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM.

Bupati Vandiko mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam memperkuat iklim investasi di Sumatera Utara.

Menurutnya, kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, dan kolaborasi antarpemerintah menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan investasi. "Pertumbuhan investasi membutuhkan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kehadiran Desk Investasi ini menjadi peluang bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Samosir, untuk semakin memperkenalkan potensi unggulan daerah dan menarik minat investor," ujar Vandiko.

Ia menilai Samosir memiliki peluang investasi yang besar, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan dukungan fasilitas informasi serta kemudahan pelayanan, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal oleh calon investor.

Vandiko menegaskan, Pemkab Samosir siap memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain meningkatkan nilai investasi daerah, upaya tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengungkapkan, Pemprov Sumut telah mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Menurut Bobby, pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan dukungan seluruh kepala daerah melalui inovasi dan kemudahan pelayanan investasi di masing-masing wilayah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan kawasan ekonomi tersebut.

Todotua menjelaskan, Desk Investasi dibentuk untuk mempercepat penyelesaian hambatan perizinan usaha sekaligus memangkas kendala birokrasi di daerah.

Ia optimistis fasilitas tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Tim Desk Investasi juga diharapkan aktif memantau kepatuhan perizinan, mengantisipasi investasi fiktif, serta memberikan sosialisasi kebijakan secara berkala.

Dengan diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera, Pemkab Samosir berharap akses informasi dan fasilitasi penanaman modal semakin mudah. Pemerintah daerah berkomitmen terus mengoptimalkan potensi unggulan serta memberikan kemudahan bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Kabupaten Samosir.

(Tarihoran)

Pj Sekda Labuhanbatu Pimpin Rapat Pemenuhan Dokumen MCP RBS, OPD Diminta Tingkatkan Koordinasi

Labuhunbatu, Jaya Pos

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, didampingi Asisten I dan Asisten III, memimpin rapat pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) Rencana Bisnis dan Strategi (RBS) Kabupaten Labuhanbatu. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat, Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut digelar untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam arahannya, Abdi Jaya Pohan meminta seluruh OPD agar segera memenuhi dokumen sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menegaskan, koordinasi dan sinergi antar-OPD sangat diperlukan agar proses pemenuhan dokumen berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap proses pemenuhan dokumen tersebut.



Pj, Seketaris Daerah Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan Saat Rapat.(Foto Kominfo)

Selanjutnya, dokumen yang telah dipenuhi akan melalui tahapan evaluasi dan verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pihak terkait untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan indikator yang dipersyaratkan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap seluruh OPD semakin meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam memenuhi dokumen MCP RBS.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus mendorong pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Inspektorat Ahlan, para pimpinan OPD. **(YN)**

Dana BOS-BOP SDN Cipayung 02 Rp769 Juta, Pengadaan Multimedia Disorot



Data Pengadaan Multimedia dan Sarpras. (Foto/DOK JAPOS.CO)

Jakarta Jaya Pos

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2026 di SDN Cipayung 02, Jakarta Timur, menjadi sorotan. Pasalnya, total anggaran yang dikelola sekolah tersebut mencapai Rp769,12 juta.

Sejumlah pos belanja bernilai besar dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Terutama terkait pengadaan barang dan jasa, pemilihan penyedia, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan dalam sistem elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (e-RKAS).

Berdasarkan data yang diperoleh JAPOS.CO, SDN Cipayung 02 mengelola dana BOS sebesar Rp369.770.000 dan dana BOP Rp399.356.452. Totalnya mencapai Rp769.126.452.

Saat dikonfirmasi pada 30 Oktober 2026, pihak sekolah yang dihadiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara menyatakan dana BOS dan BOP telah digunakan.

"BOS-BOP sudah kami gunakan," ujar Kepala SDN Cipayung 02.

Namun, pihak sekolah belum menjelaskan secara terperinci penggunaan anggaran tersebut, termasuk jenis barang dan jasa yang dibeli, proses pengadaan, serta penyedia yang terlibat.

Dalam alokasi dana BOS, terdapat tiga pos belanja dengan nilai cukup besar. Rinciannya, pengadaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp92.011.754, pemeliharaan sarana dan prasarana Rp79.056.320, serta pengembangan perpustakaan Rp75.640.116.

Total ketiga pos tersebut mencapai Rp246.708.190 atau sekitar 66,7 persen dari keseluruhan dana BOS. Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan dan pemilihan penyedia. Publik perlu mengetahui apakah prosesnya telah sesuai ketentuan, termasuk pertimbangan harga, spesifikasi, kualitas barang, dan kebutuhan sekolah.

Untuk pengadaan multimedia, sekolah perlu menjelaskan jenis peralatan yang dibeli, spesifikasi, jumlah unit, harga satuan, serta penyedianya. Informasi tersebut penting untuk memastikan barang yang dibeli benar-benar dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.

Begitu pula dengan pengembangan perpustakaan. Rincian buku yang dibeli, jumlah eksemplar, harga satuan, penerbit, dan penyedia perlu dijelaskan agar manfaat anggaran bagi peserta didik dapat diketahui.

Selain dana BOS, penggunaan dana BOP sebesar Rp399.356.452 juga membutuhkan penjelasan.

Berdasarkan data anggaran, terdapat tiga pos belanja bernilai besar, yakni administrasi kegiatan sekolah Rp35.553.100, pengadaan sarana dan prasarana Rp85.564.872, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp147.507.660.

Sekolah perlu menjelaskan barang dan jasa yang dibeli, kegiatan yang dilaksanakan, volume pekerjaan, jumlah penerima manfaat, serta penyedia yang ditunjuk.

Salah satu pos yang perlu diperjelas adalah pengadaan sarana dan prasarana melalui dana BOP sebesar Rp85.564.872. Sebab, dalam dana BOS juga tercatat anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp79.056.320.

Kedua pos tersebut perlu dirinci untuk memastikan penggunaannya berbeda dan tidak terjadi penganggaran atau pembayaran ganda terhadap objek pekerjaan yang sama.

Pihak sekolah diharapkan dapat menunjukkan rincian pekerjaan, lokasi, volume, bukti transaksi, dan dokumen pertanggungjawaban dari masing-masing sumber anggaran.

Penggunaan dana pendidikan tidak cukup hanya dinyatakan telah direalisasikan. Setiap pengeluaran harus didukung perencanaan, bukti transaksi, hasil pengadaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Jika terdapat penyedia yang digunakan secara berulang, hal itu tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, kewajaran harga, proses pemilihan penyedia, kualitas barang, dan kesesuaian pekerjaan tetap perlu diperiksa.

Karena itu, SDN Cipayung 02 diharapkan membuka penjelasan mengenai realisasi dana BOS dan BOP 2026, termasuk dokumen perencanaan dalam e-RKAS, bukti pembelian, kuitansi, faktur, dan laporan pertanggungjawaban.

Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pendidikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan.

Jaya Pos menilai penggunaan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat. Penelaahan diperlukan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, proses pengadaan, dan realisasi anggaran.

Sorotan terhadap sejumlah pos belanja ini bukan berarti telah terbukti terjadi penyimpangan. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi para pihak, serta hasil audit atau pemeriksaan lembaga berwenang. **(Brutu)**

Bupati Ketapang Buka Workshop Kepemimpinan, Dorong Peningkatan Kualitas SDM



Bupati Ketapang saat buka Workshop.(Foto Agustinus)

Ketapang Jaya Pos

Bupati Ketapang Alexander Wilyo membuka Workshop Leadership and Communication Skill bertema "Menjadi Pemimpin Kelas Dunia" di Hotel Borneo Ketapang, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan sejumlah guru. Workshop menghadirkan Syafii Efendi, S.E., M.M., President of Indonesian BRICS Youth Forum, yang juga dikenal sebagai coach, motivator, entrepreneur, dan penulis.

Dalam kegiatan itu, Syafii Efendi memberikan materi mengenai kepemimpinan dan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas para peserta.

Dalam sambutannya, Alexander Wilyo menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Ketapang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas manusia, termasuk mental, karakter, akhlak, dan adab.

"Kalau kita membangun jalan, jembatan, dan gedung, tetapi tidak didukung sumber daya manusia yang baik, maka pembangunan itu tidak akan memberikan manfaat secara maksimal. Karena itu, membangun manusia menjadi hal yang sangat penting," tegas Alexander.

Bupati juga menyoroti peran guru dalam membentuk generasi penerus bangsa. Ia mengajak para pendidik untuk terus meningkatkan semangat, dedikasi, dan kebanggaan terhadap profesinya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, Pemkab Ketapang berupaya memberikan perhatian kepada guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.

Upaya tersebut antara lain melalui rencana pemberian penghargaan bagi guru teladan dan berdedikasi. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan fasilitas serta perbaikan rumah dinas guru secara bertahap.

Selain itu, sejumlah program pendidikan telah dijalankan, di antaranya bantuan seragam dan perlengkapan belajar gratis bagi siswa SD dan SMP serta beasiswa melalui Kartu Ketapang Pintar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Alexander berharap program tersebut dapat menekan angka putus sekolah, meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan memperluas kesempatan anak-anak Ketapang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Ia menilai kepemimpinan yang kuat dan guru yang inspiratif memiliki peran penting dalam kemajuan daerah.

"Pemimpin yang hebat mampu menggerakkan organisasi. Guru yang hebat mampu menginspirasi generasi. Keduanya merupakan kekuatan penting dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri," ujarnya.

Alexander juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah, guru, dan masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun Ketapang. Menurutnya, Ketapang merupakan rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun melalui kerja sama serta tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Melalui workshop tersebut, Bupati berharap peserta dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi, memperkuat karakter, serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian.

Peningkatan kualitas kepemimpinan dan pendidikan diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan SDM Ketapang yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus mendorong terwujudnya daerah yang semakin maju dan mandiri. **(Agustinus)**

Perkuat Mental dan Spiritual, Polres Binjai Gelar Binrohtal Serta Doa Bersama

Binjai, Jaya Pos

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membentuk karakter personel yang berintegritas, Polres Binjai menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) serta doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Polres Binjai, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, Wakapolres Binjai Kompol Sofyan Helmi Nasution, Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny. Tika Bimo beserta pengurus, para pejabat utama (PJU), personel Polres Binjai, serta aparatur sipil negara (ASN) Polres Binjai.

Kegiatan Binrohtal ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian bagi seluruh personel agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



Kapolres Binjai beserta jajarannya mengikuti Binrohtal di Masjid Al-Ikhlas, (foto/ Humas Polres Binjai)

Selain memperkuat mental dan spiritual, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta integritas dalam menjalankan tugas kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dengan pembinaan rohani dan mental secara berkelanjutan, Polres Binjai berharap seluruh personel dapat memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat, aman, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terwujud personel Polri yang berakhlak mulia, berintegritas, serta semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat.

(Fatimah)

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 866 TAHUN XX, 16 - 22 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Rustandi Terpilih Jadi Ketua PWI Kabupaten Bandung Untuk Periode 2026 – 2029

Kabupaten Bandung, Jaya Pos

Rustandi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung periode 2026–2029 dalam Konferensi PWI Kabupaten Bandung 2026. Ia unggul atas Asep Syahrial setelah pemilihan berlangsung hingga dua putaran.

Dalam pemungutan suara putaran pertama, Asep Syahrial memperoleh 17 suara, Rustandi 13 suara, sedangkan Suhendar meraih 9 suara dari total 39 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Karena belum ada kandidat yang memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai pemenang, pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua sesuai mekanisme organisasi.

Pada putaran kedua, persaingan berlangsung antara Rustandi dan Asep Syahrial. Hasil penghitungan suara menunjukkan Rustandi memperoleh 20 suara, sementara Asep Syahrial mendapatkan 18 suara. Selain itu, terdapat satu suara abstain.

Dengan hasil tersebut, Rustandi resmi ditetapkan sebagai Ketua PWI Kabupaten Bandung untuk masa bakti 2026–2029.

Usai terpilih, Rustandi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dan pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ia berkomitmen menjalankan visi dan misi yang telah disiapkan untuk membawa PWI Kabupaten Bandung menjadi organisasi yang lebih baik.

Menurut Rustandi, kekompakan dan kerja sama seluruh anggota menjadi kunci dalam menjalankan roda organisasi. Karena itu, ia mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam PWI untuk berperan aktif mendukung dan merealisasikan program kerja kepengurusan mendatang.

Selain memperkuat soliditas internal, Rustandi juga menilai pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.

Ia menyebut tantangan organisasi profesi wartawan semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Kondisi tersebut turut mengubah

▸▸Halaman 11



Wakil ketua bidang organisasi PWI Jabar Ghiok Riswoto, M.I.Kom menyerahkan Pataka PWI kepada Rustandi ketua PWI Kabupaten Bandung terpilih. 11/11/2026 (Foto Hendri)

Wali Kota Jakarta Timur Kukuhkan 40 Pengurus P5DKIJ, Pensiunan Didorong Tetap Berkontribusi

Jakarta, Jaya Pos

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Mujirin, mengukuhkan 40 pengurus Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (P5DKIJ) tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Pengukuhan berlangsung di Ruang Pola Lantai 2, Gedung Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Mujirin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu

►► Halaman 11



Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Mujirin, mengukuhkan 40 pengurus Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Rabu (11/11/2026).(Foto Simbolon)

Polres Way Kanan Gelar Upacara Hari Pahlawan ke-81, Wakapolres Tekankan Nilai Pengabdian

Way Kanan, Jaya Pos

Polres Way Kanan menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Parama Satwika Mapolres Way Kanan, Selasa (10/11/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran pejabat serta personel kepolisian.

Upacara dipimpin Wakapolres Way Kanan Kompol Martono. Hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, personel Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Polres Way Kanan.

►► Halaman 11



Polres Way Kanan, Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke,81 tahun, 2026(Humas Polres).

Dari Pengajar Menjadi Fasilitator Pembelajaran, Dorong Kemandirian Siswa di SDN Turus 1

Pandeglang Jaya Pos

Perubahan peran guru dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan kepercayaan diri siswa dalam proses belajar.

Pengalaman mengajar di SDN Turus 1 menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, karakteristik, dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, pembelajaran perlu berpusat pada kebutuhan peserta didik dengan memberikan ruang bagi mereka untuk aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta menyelesaikan tugas secara mandiri.

Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme Jean Piaget, yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Selain kegiatan di dalam kelas, lingkungan sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Siswa diajak mengamati tumbuhan, mengenali kondisi lingkungan, serta memahami pentingnya



Ilustrasi

menjaga kebersihan dan kelestarian sekolah. Pemanfaatan gambar, video, dan media digital turut mendukung pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami.

Dalam penerapannya, guru juga perlu memahami kemampuan awal setiap siswa. Peserta didik yang telah memahami materi da pat diberikan kegiatan pengayaan, sedangkan siswa yang masih mengalami kesulitan memperoleh bimbingan tambahan sesuai kebutuhannya.

Perubahan pendekatan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya keberanian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang sebelumnya malu berbicara dan enggan menjawab pertanyaan, perlahan mulai berani mengangkat tangan, bertanya, serta menyampaikan pendapat di depan teman-temannya.

Meski demikian, penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa bukan tanpa tantangan. Per

►► Halaman 11

Bupati Simalungun Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, TKD Turun Rp88,45 Miliar

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRD, Pamatang Raya, Sumatera Utara.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sugiarto, SE, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur terkait, insan pers, LSM, dan undangan lainnya.

Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang terencana, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Ranperda APBD tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prioritas kebijakan nasional, antara lain swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembenahan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kemampuan fiskal menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 Sep-

►► Halaman 11



Bupati siamlungun,Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 : Perkuat Kemajuan Daerah Berkelanjutan. (Foto/ES)



Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dan pengurus Masjid Azizi, Rabu (11/11/2026).(Foto Hengki)

Rutan Tanjung Pura Salurkan Bansos dan Baju Koko untuk Warga serta Pengurus Masjid Azizi

Tanjung Pura, Jaya Pos

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dan pengurus Masjid Azizi, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2.

Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok, terdiri atas beras, gula, minyak goreng, dan teh bubuk. Paket sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari keluarga penerima.

Selain bantuan sembako, Rutan Tanjung Pura juga menyerahkan 10 paket baju koko kepada pengurus Masjid Azizi Tanjung Pura sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan aktivitas peribadatan di lingkungan masjid.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, petugas menyalurkan paket tersebut dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Penyaluran juga menjangkau sejumlah wilayah yang relatif sulit diakses agar masyarakat kurang mampu dapat menerima bantuan secara langsung.

▸▸Halaman 11

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Kapolres Langkat Ajak Personel Lanjutkan Semangat Perjuangan

Langkat, Jaya Pos

Suasana khidmat mewarnai upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Jananura Polres Langkat, Selasa (10/11/2026) yang dipimpin langsung oleh Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K.,

Upacara tersebut diikuti oleh para PJU, Kapolsek, Perwira, personel Polri serta ASN Polres Langkat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya dikenang melalui sejarah, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dan pengabdian sehari-hari.

Bagi jajaran Polres Langkat, nilai-nilai perjuangan tersebut tercermin melalui kedisiplinan, integritas, loyalitas, serta komitmen dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan sebagai Irup di peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, (foto/ Humas Polres Langkat)

Melalui momentum tersebut, Kapolres mengajak seluruh personel Polres Langkat untuk terus menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam pelaksanaan tugas dengan mengedepankan disiplin, integritas, tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Semangat perjuangan para pahlawan hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus mengabdi dengan tulus demi menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat "Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman."

Melalui semangat "Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai," Polres Langkat berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.**(Fatimah)**

Pangdam I/BB Tutup TMMD ke-130 di Labusel

Perkuat Sinergi TNI dan Rakyat Bangun Desa


Pangdam I / BB Tutup TMMD ke- 123 Tahun Anggaran 2026 Di Labusel, Perkuat Sinergi TNI dan Rakyat Dalam Pembangunan Desa. (Foto.RD)

Labuhanbatu Selatan, Jaya Pos

Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kamis (12/11/2026).

Penutupan TMMD tersebut dihadiri Komandan Korem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos., M.Si., selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD yang dibacakan Pangdam I/BB, disampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan program TMMD, termasuk melalui alokasi anggaran APBD.

TMMD ke-130 berlangsung mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026. Program ini menjadi salah satu upaya TNI bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Dalam amanatnya, Kasad menegaskan TMMD merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, ketahanan wilayah, dan budaya gotong royong.

Hal tersebut sejalan dengan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional. TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, serta mengabdi untuk kepentingan rakyat.

TMMD ke-130 mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa".**

Kasad juga menekankan bahwa keberhasilan TMMD tidak terlepas dari sinergi TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Pada pelaksanaan TMMD ke-130 yang digelar serentak di 51 kabupaten/kota, sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. Selain pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik, program TMMD juga terintegrasi dengan lima program unggulan TNI AD, yakni Ketahanan Pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK, penurunan stunting, serta Bersatu dengan Alam.

Melalui program tersebut, TNI AD turut mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perluasan akses air bersih, peningkatan kualitas kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Di akhir amanatnya, Kasad mengingatkan masyarakat agar menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan TMMD sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Penutupan TMMD ke-130 bukan sekadar mengakhiri rangkaian kegiatan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kerja sama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melanjutkan pembangunan desa.

Melalui jajaran Korem 022/Pantai Timur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menjaga ketahanan wilayah demi kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah pejabat turut menghadiri upacara penutupan TMMD ke-130, di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa, Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto, S.I.P., M.I.P., Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf M. Fuat Hasan, S.I.P., Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, S.H., dan Dandim 0209/LB Letkol Kav Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P.

Hadir pula para Dandim jajaran, Danlanal Tanjung Balai Letkol Laut (P) S. Ryanto, M.Tr., Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Ari Winata, Kapolres Labusel AKBP Rosep Efendi, S.I.K., M.H., Kajari Labusel Alex Sander Zaldi, S.H., M.H., Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, S.H., serta Sekda Labusel M. Reza Pahlepi Nasution, S.STP., M.A.P. Sejumlah unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan insan pers juga hadir dalam kegiatan tersebut.**(R.d)**

Tindak Lanjut Program Green Policing Kapolri, Polres Maros Bersihkan Pasar Tradisional


Personel Polres Maros peduli kebersihan. (Foto/Eril)

Maros, Jaya Pos

Polres Maros terus menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui aksi bersih-bersih di kawasan Pasar Tradisional Modern (Tramo), Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Commander Wish Kapolri melalui program Green Policing atau gerakan Polri peduli lingkungan.

Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Maros AKP Ahmad, S.Sos., M.H., mengatakan bahwa aksi kepedulian lingkungan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman," ungkap Perwira berpangkat tiga balok tersebut.

Nampak personel turun langsung membersihkan area pasar dengan menyapu dan mengumpulkan sampah di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari parkiran pasar, area Masjid hingga bagian belakang pasar.

AKP Ahmad menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Maros dalam mendukung kebijakan Kapolri untuk membangun budaya peduli lingkungan.

"Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," lanjutnya.

Melalui program Green Policing, kata AKP Ahmad, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama.

"Kami berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga fasilitas umum," tuturnya.

(Hk)

Amir Kadir Raih Gelar Magister Hukum, Siap Perjuangkan Keadilan

Maros, Jaya Pos

Amir Kadir, S.H., M.H., berhasil meraih gelar Magister Hukum (S2) Angkatan 28 di Universitas Sawerigading Makassar.

Wisuda yang dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026 itu menjadi pencapaian penting dalam perjalanan akademik dan profesinya sebagai advokat serta penasihat hukum.

Amir mengatakan, gelar akademik yang diraihnya bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

"Gelar Magister Hukum bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar untuk memperjuangkan keadilan," kata Amir dalam wawancara khusus bersama Jaya Pos.

Ia mengaku, menjalani profesi advokat sembari menyelesaikan pendidikan S2 memiliki tantangan tersendiri. Terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, aktivitas sosial, dan kewajiban akademik.


Amir Kadir SH, MH. (Foto/Amir)

Meski demikian, semangat untuk terus belajar menjadi motivasi hingga berhasil menyelesaikan pendidikan.

Setelah meraih gelar tersebut, Amir berkomitmen meningkatkan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama kelompok kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Selain itu, ia ingin memperkuat edukasi hukum masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial melalui LSM PEKAN-21.

Menurut Amir, penegakan hukum harus mengedepankan keadilan dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kedudukan sosial seseorang.

"Keberhasilan seorang praktisi hukum bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau tingginya gelar akademik, tetapi seberapa besar ilmu yang dimiliki dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat," ujarnya.

Amir yang juga menjabat Sekretaris Jenderal LSM PEKAN-21 itu turut berpesan kepada generasi muda agar tidak menyerah dalam mengejar pendidikan.

Menurutnya, keterbatasan ekonomi, usia, dan kesibukan bukan alasan untuk berhenti menuntut ilmu.

"Jangan ukur masa depan dari keadaan kita hari ini. Ukurlah dari keberanian untuk memperbaiki keadaan dan kesungguhan untuk terus berusaha," pesannya.

Ia berharap ilmu yang diperoleh di Universitas Sawerigading Makassar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagi Amir, keberhasilan meraih gelar Magister Hukum menjadi awal untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pengabdian dalam memperjuangkan keadilan.

(Kim)

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Bupati Labuhanbatu dr, Hj, Maya Hasmita, Salah Satu Dari Tujuh Kepala Daerah di Indonesia yang Menerima BMPS Award 2026



Bupati Labuhanbatu dr,Hj,Maya Hasmita Sp,OG,M,KM Bersama beberapa Kepala Daerah Saat Menerima Penghargaan BMPS Award 2026.(Foto Kominfo)

Labuhunbatu, Jaya Pos

Kepedulian terhadap dunia pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga harus hadir dalam tindakan nyata. Komitmen itulah yang mengantarkan Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., meraih penghargaan BMPS Award 2026 kategori "Ing Ngarsa Sung Tuladha" dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Maya Hasmita saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPN BMPS yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Bali, Werdi Budaya Art Centre, Kota Denpasar, Rabu (11/11).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kepemimpinan, keteladanan, kepedulian, serta kontribusi Bupati Labuhanbatu dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta. Apresiasi tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Bupati Maya Hasmita menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026. Selain Bupati Labuhanbatu, penghargaan serupa diberikan kepada Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, Wali Kota Bogor Dr. Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang H. Fadly Amran, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Salah satu pertimbangan utama pemberian penghargaan tersebut adalah kepedulian Bupati Labuhanbatu terhadap keberlangsungan pendidikan swasta. Kepedulian itu diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi SMK Swasta Tunas Karya Unggul beberapa bulan lalu.

Langkah tersebut menjadi gambaran bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Pemberian penghargaan ini juga merupakan hasil rekomendasi BMPS Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Ketua BMPS Provinsi Sumatera Utara, H. Muhammad Subandi, saat menghadiri pelantikan BMPS Kabupaten Labuhanbatu pada September lalu.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan organisasi nasional yang menjadi wadah musyawarah dan perjuangan bagi penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia. Memasuki usia ke-55 tahun, BMPS terus mendorong penguatan lembaga pendidikan swasta, membangun kemitraan dengan pemerintah, serta memperjuangkan peningkatan mutu dan keberlanjutan pendidikan nasional.

Mukernas BMPS 2026 tidak hanya menjadi agenda pemberian penghargaan, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan langkah dan arah pengembangan pendidikan swasta dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sejumlah isu penting menjadi pembahasan, di antaranya strategi pengelolaan pendidikan swasta di era digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan teknologi coding. Forum ini juga membahas penguatan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendorong transformasi mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional.

Mukernas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Usai menerima penghargaan, Bupati Maya Hasmita menyampaikan terima kasih kepada DPN BMPS atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar kebanggaan, melainkan juga menjadi motivasi untuk semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan.

Menurutnya, sekolah negeri dan swasta harus tumbuh berdampingan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat.

Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah dan seluruh penyelenggara pendidikan semakin kuat, sehingga berbagai tantangan di dunia pendidikan dapat dihadapi bersama. Baginya, kemajuan pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Penghargaan BMPS Award 2026 ini menjadi pengakuan sekaligus penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan pendidikan. Sebab, masa depan daerah tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga melalui investasi pendidikan yang membuka kesempatan bagi setiap anak untuk meraih cita-citanya.

Dengan komitmen dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap pendidikan negeri maupun swasta dapat berkembang secara beriringan, melahirkan generasi yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing demi mewujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar.

Turut mendampingi Bupati Labuhanbatu dalam kegiatan tersebut, Ketua BMPS Labuhanbatu Rahmat Hidayat Rambe beserta sejumlah rombongan lainnya.**(YN)**

Peringati Hari Pahlawan, Wabup Samosir Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata



Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Foto/Diskominfo)

Samosir, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Dalam sambutannya, Ariston mengingatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Nilai perjuangan para pahlawan harus diterapkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.

Saat membacakan amanat Menteri Sosial, Ariston menyampaikan bahwa 10 November merupakan momentum untuk mengenang keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Para pahlawan telah membuktikan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Semangat tersebut dinilai tetap relevan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini.

Melalui tema Hari Pahlawan 2026, masyarakat diajak menjadikan keberanian, pengabdian, persatuan, dan rela berkorban sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut amanat tersebut, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata. Semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan publik yang semakin baik.

Pemerintah dan seluruh elemen bangsa juga diingatkan untuk menjalankan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 33 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sejalan dengan amanat konstitusi, pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus mendorong perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat.

Ariston juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Menurutnya, pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat.

Kesetiakawanan sosial harus diwujudkan melalui tindakan sederhana tetapi berdampak, seperti membantu sesama, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan, serta hadir mendukung masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Mengakhiri sambutan Menteri Sosial, masyarakat diajak meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan.

Jika para pahlawan telah berjuang mempertahankan kemerdekaan, generasi penerus kini memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian sosial.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera merupakan tanggung jawab bersama. Semangat kepahlawanan harus terus hidup melalui karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. **(Tarihoran)**

Sekretariat DPRD Langkat Hadirkan Inovasi Digital Melalui Aplikasi Aset dan AVTEX



Sekretariat DPRD Langkat Hadirkan Inovasi Digital.

Langkat, Jaya Pos

Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi melalui penerapan inovasi berbasis teknologi digital. Dua inovasi yang diterapkan yakni aplikasi pencatatan aset dan AVTEX (Aplikasi Voice to Text), sebagai langkah nyata dalam mendukung tata kelola administrasi yang lebih efektif, efisien, dan modern.

Penerapan kedua inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat yang terus mendorong setiap perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Drs. Basrah Pardomuan, M.AP, menerapkan aplikasi pencatatan aset dan AVTEX sebagai bentuk komitmen dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Penerapan inovasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam pengelolaan administrasi, dokumentasi serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.

Inovasi pertama berupa aplikasi pencatatan aset yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan aset secara digital. Melalui aplikasi ini, proses pencatatan aset dilakukan dengan lebih tertata, sistematis dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan administrasi. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempermudah proses penelusuran data aset, meningkatkan ketertiban administrasi serta mendukung akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

Sementara itu, inovasi kedua adalah AVTEX (Aplikasi Voice to Text), yaitu aplikasi yang memanfaatkan teknologi pengenalan suara untuk mengubah percakapan menjadi teks secara otomatis. Aplikasi ini diterapkan untuk membantu proses penyusunan notulensi rapat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, sehingga dokumentasi hasil rapat dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

AVTEX ini berpotensi mengurangi beban pencatatan manual, mempercepat penyusunan notulensi dan membantu meningkatkan kelengkapan dokumentasi rapat.

Untuk penerapan aplikasi ini lebih komprehensif, Rabu (4/11/2026), dilaksanakan sosialisasi kepada staf Sekretariat DPRD Langkat sebagai bentuk pemahaman aplikasi pencatatan aset dan AVTEX.

Kehadiran aplikasi pencatatan aset dan AVTEX ini dalam rangka membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua inovasi tersebut juga untuk peningkatan efisiensi kerja, ketertiban administrasi serta penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

Melalui penerapan inovasi ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat diharapkan mampu mewujudkan tata kelola administrasi yang semakin profesional.

(AN)

POR Kecamatan Kramat Jati 2026 Digelar, Siswa SD Adu Kemampuan di 3 Cabang Olahraga



Nuri Rahmawati kasatlak pendidikan kecamatan Kramat Jati didampingi Ngadino pengawas dan Anang Hadi saat membuka POR tingkat kecamatan di Halaman SDN Kramat Jati 24.(11/11/2026).(dok.JS)

Jakarta Jaya Pos

Pekan Olahraga (POR) Kecamatan Kramat Jati 2026 resmi digelar pada 11-13 November 2026. Kegiatan ini diikuti siswa kelas 6 dari sejumlah sekolah dasar (SD) untuk berkompetisi dalam tiga cabang olahraga, yakni bola basket, futsal, dan bola voli.

Pertandingan berlangsung di tiga lokasi berbeda. Cabang bola basket digelar di SDN Kramat Jati 24, futsal di SDN Kramat Jati 02, sedangkan bola voli berlangsung di SDN Kramat Jati 11.

Pembukaan POR dilaksanakan di SDN Kramat Jati 24 dan dibuka langsung oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan (Kasatlak Pendidikan) Kecamatan Kramat Jati, Nuri Rahmawati. Acara tersebut turut dihadiri Pengawas Pendidikan Ngadino, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Kramat Jati Anang Hadi, serta para kepala sekolah.

Peserta kompetisi merupakan siswa perwakilan dari empat wilayah binaan di Kecamatan Kramat Jati. Mereka adalah para siswa yang sebelumnya berhasil meraih juara pertama dan kedua dalam seleksi di masing-masing wilayah.

POR Kecamatan Kramat Jati digelar sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik kelas 6 pada semester pertama. Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan, mengembangkan bakat, dan membangun semangat berkompetisi secara sehat.

Ketua K3S Kecamatan Kramat Jati, Anang Hadi, mengatakan POR bukan sekadar ajang pertandingan untuk memperebutkan gelar juara. Menurutnya, kegiatan tahunan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antarsatuan pendidikan.

"Melalui POR, kita belajar bahwa olahraga bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang sportivitas, disiplin, kerja sama, kekompakan, dan saling menghargai," kata Anang Hadi.

Dia berharap nilai-nilai positif yang diperoleh selama kompetisi dapat diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengejar prestasi olahraga, peserta juga diharapkan mampu mengembangkan sikap disiplin, sportif, dan menghargai sesama.

POR Kecamatan Kramat Jati 2026 berlangsung selama tiga hari dan dijadwalkan berakhir pada Jumat (13/11/2026). Penutupan kegiatan akan dilaksanakan di SDN Kramat Jati 11**.(Jiston)**

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.
Badar Subur

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto , Charles Limbong
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami Al
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu:
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | | Sutanto
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Mario Pulana Tuntaskan Website Resmi, Menuju Kelurahan Digital Berbasis Nilai TIPPA

Maros, Jaya Pos

Kelurahan Mario Pulana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, terus mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui transformasi digital.

Terbaru, pemerintah kelurahan tersebut menuntaskan pembangunan website resmi sebagai langkah menuju Kelurahan Digital berbasis nilai TIPPA.

Lurah Mario Pulana, Bakti Ben Setiawan, mengatakan kehadiran website resmi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan kelurahan yang lebih modern dan mudah diakses masyarakat.

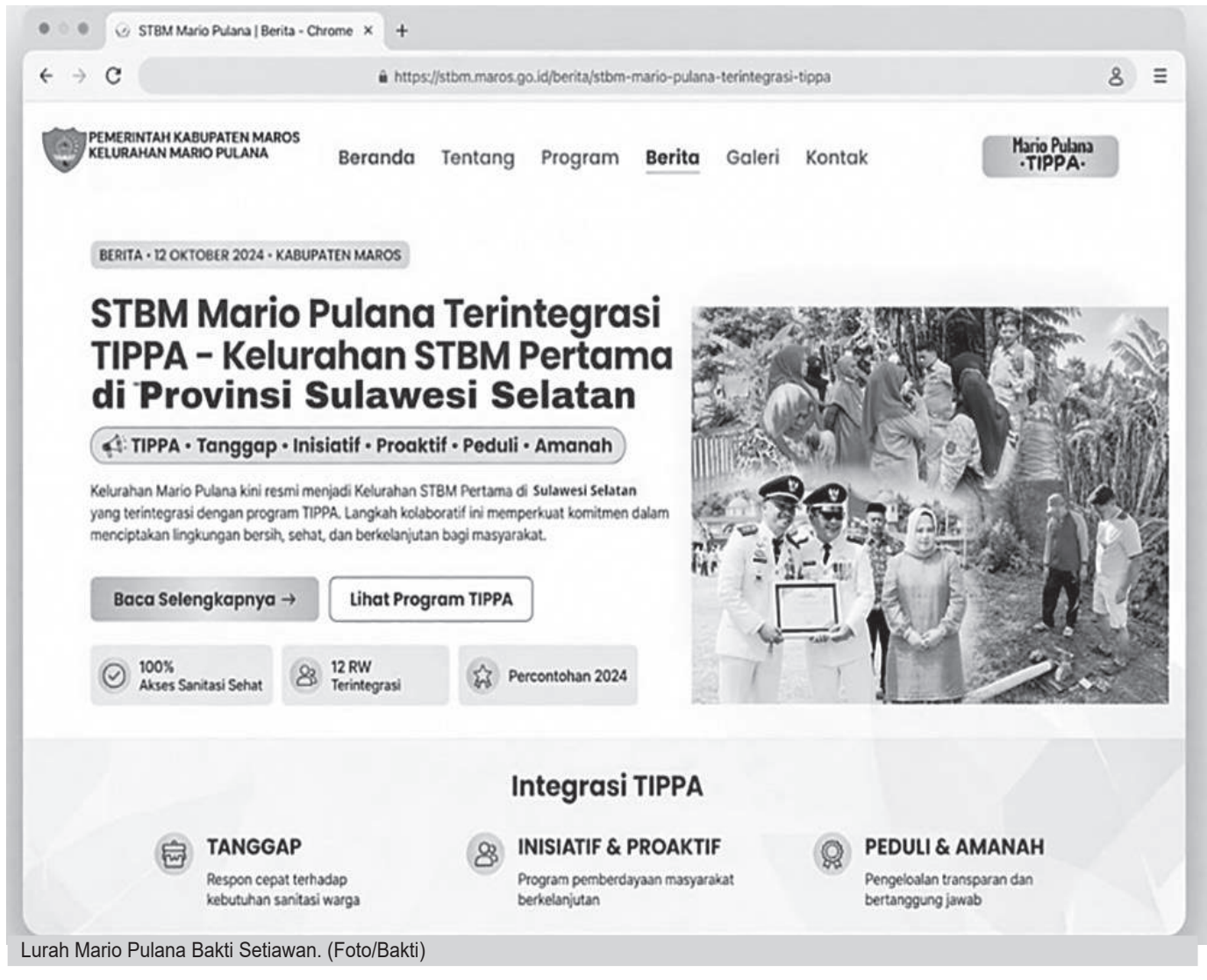
Inovasi tersebut mengusung konsep Mario Pulana SBA (Service By Application), yakni pendekatan pelayanan masyarakat berbasis aplikasi untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

Menurut Bakti, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kelurahan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui website resmi dan konsep Mario Pulana SBA, kami ingin mendorong pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat serta mengembangkan Mario Pulana menuju kelurahan digital berbasis nilai," ujarnya.

Selain transformasi digital, Kelurahan Mario Pulana juga mengembangkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang terintegrasi dengan pendekatan TIPPA.

TIPPA merupakan akronim dari Tanggap, Inisiatif, Proaktif, Peduli, dan Amanah.



Lurah Mario Pulana Bakti Setiawan. (Foto/Bakti)

Program tersebut mencakup 12 Rukun Warga (RW), dengan capaian akses sanitasi sehat sebesar 100 persen dan menjadi salah satu program percontohan pada 2024.

Bakti mengatakan, integrasi TIPPA diwujudkan melalui lima prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip tanggap diwujudkan melalui respons cepat terhadap kebutuhan sanitasi warga. Sementara inisiatif dan proaktif diterapkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun prinsip peduli dan amanah menekankan pengelolaan program secara transparan serta bertanggung jawab.

Dengan tuntasnya pembangunan website resmi dan pengembangan Mario Pulana SBA, pemerintah kelurahan berupaya mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi dengan nilai-nilai pelayanan publik.

Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat keterbukaan informasi dan akses pelayanan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Mario Pulana pun diarahkan menjadi kelurahan digital yang mengedepankan pelayanan modern dengan tetap berlandaskan nilai Tanggap, Inisiatif, Proaktif, Peduli, dan Amanah.

(Kim)

Kemlu RI Benarkan WNI Ditangkap Ukraina, Diduga Bergabung dengan Militer Rusia

Jakarta Jaya Pos

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan adanya seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS yang ditangkap otoritas Ukraina. Pria berusia 49 tahun itu diduga bergabung dengan militer Rusia dan terlibat dalam perang melawan Ukraina.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev telah menerima informasi mengenai penangkapan tersebut.

"KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina," kata Yvonne di Jakarta, Rabu (11/11/2026), seperti dikutip Antara.

Menindaklanjuti laporan tersebut, KBRI Kiev telah meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran agar dapat menemui AS serta melakukan pendalaman dan verifikasi terkait kasus tersebut.

Yvonne menegaskan, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap dugaan keterlibatan WNI dalam militer Rusia. Kemlu juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap yang bersangkutan. "Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.



Gedung Pancasila yang ada di komplek Kementerian Luar Negeri. (foto/wikimedia commons/free share)

Kemlu RI sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di negara yang sedang dilanda konflik bersenjata.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan dan keabsahan pekerjaan yang ditawarkan. WNI juga diimbau tidak tergiur imbalan yang tidak wajar maupun menandatangani kontrak kerja yang tidak dipahami isinya.

Sebelumnya, layanan bantuan militer dinas intelijen Ukraina, Hochu Zhit atau "Saya Mau Hidup", mengungkap penangkapan seorang WNI yang disebut bergabung dengan militer Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina.

WNI berinisial AS tersebut diketahui berusia 49 tahun dan berasal dari Blitar, Jawa Timur.

Menurut informasi yang disampaikan layanan tersebut, AS tiba di Moskow pada 22 Juli 2026. Ia disebut menandatangani kontrak untuk pekerjaan proyek konstruksi. Namun, dalam perkembangannya, AS justru dikirim ke garis depan pertempuran di Ukraina. Setelah tiba di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, AS dilaporkan berusaha melarikan diri, tetapi gagal. Satuan tempatnya bertugas kemudian disebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone.

AS dikabarkan sempat berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya diamankan oleh otoritas Ukraina. Layanan Hochu Zhit juga menyebut telah berlangsung pertemuan antara otoritas Ukraina dan Duta Besar RI untuk Ukraina, Arif Basalamah, guna membahas penanganan kasus tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ukraina disebut menyetujui pemberian akses kekonsuleran kepada AS. Hingga kini, Kemlu RI masih perlu melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kronologi keberangkatan, proses perekrutan, status hukum, serta kondisi WNI tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memastikan hak-hak AS tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum internasional dan peraturan yang berlaku.**(red)**

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/ Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur || **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Rutan Tanjung Pura Salurkan Bansos ..... *Halaman 7*

Kepala Rutan Tanjung Pura bersama jajaran turut terlibat dalam pembagian bantuan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih dekat antara jajaran pemasyarakatan dengan warga sekitar.

Masyarakat penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian serta kepedulian Rutan Tanjung Pura.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Rutan Tanjung Pura berharap peringatan Hari Bakti Imipas ke-2 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Rutan Tanjung Pura untuk terus menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, peduli, dan memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.(Red)

Polres Way Kanan Gelar Upacara Hari Pahlawan.....Halaman 7

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengangkat tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang dibacakan Kompol Martono, disampaikan bahwa nilai kepahlawanan, seperti keberanian, pengabdian, persatuan, ketulusan, dan rela berkorban, harus menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat.

Semangat kepahlawanan saat ini tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, juga melalui kerja keras, pengabdian, pelayanan kepada masyarakat, serta kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Bagi jajaran Polri, nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini, Polres Way Kanan mengajak seluruh personel untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan meningkatkan disiplin, soliditas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pengabdian terbaik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman, damai, dan kondusif. **(Suhaili)**

Bupati Simalungun Sampaikan Nota.....*Halaman 7*

tember 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk TA 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000 atau mengalami penurunan Rp88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan skala prioritas, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Adapun proyeksi struktur keuangan Kabupaten Simalungun dalam Ranperda APBD TA 2027 meliputi:

- Pendapatan daerah sebesar Rp2.403.592.358.120.
- Belanja daerah sebesar Rp2.417.177.381.532.
- Defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412.
- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp17.585.023.412.
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000.

Bupati menegaskan, prinsip utama penyusunan APBD 2027 adalah pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan yang terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, lancar, dan tepat waktu sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen mewujudkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD TA 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemajuan daerah secara berkelanjutan, sejalan dengan visi *"Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju".*

(Erwinsah Sinaga)



Wali Kota Jakarta Timur Kukuhkan 40 Pengurus.....*Halaman 7*

memperkuat kebersamaan, pengabdian, dan silaturahmi di kalangan pensiunan.

Menurutnya, masa purnabakti bukan berarti berakhirnya kontribusi seseorang kepada masyarakat dan pemerintahan. Para pensiunan masih memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keteladanan yang dapat menjadi bekal pembelajaran bagi aparatur yang masih aktif.

"Saya merasakan energi positif yang besar bagi kami yang masih aktif. Bapak dan Ibu adalah guru dan mentor bagi kami. Saya berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang membahagiakan anggotanya, bermanfaat bagi sesama, serta menjadi kebanggaan dalam mempererat silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur," ujar Mujirin.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta Syahrul Effendi, Ketua P5DKIJ Jakarta Timur Sukarno, serta sejumlah penasihat P5DKIJ Jakarta Timur, yakni Andi Mappaganti, Joko Ramadhan, Gandi Sulhani, dan Komarudin. Hadir pula Pembina Badan Koordinasi dan Kegiatan Sosial DKI Jakarta, Budiharjo.

Sementara itu, Ketua Umum P5DKIJ DKI Jakarta, Syahrul Effendi, berharap kepengurusan baru dapat meningkatkan peran organisasi dalam memperhatikan kesejahteraan para pensiunan, terutama di bidang kesehatan dan sosial.

Ia mengungkapkan, P5DKIJ telah menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mempercepat pelayanan kesehatan bagi para pensiunan.

"P5DKIJ sudah bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah untuk percepatan pelayanan kesehatan bagi para pensiunan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Wali Kota Jakarta Timur, Pak Mujirin, yang luar biasa memberikan perhatian kepada para pensiunan," ungkap Syahrul.

Dengan kepengurusan baru, P5DKIJ Jakarta Timur diharapkan semakin solid dalam mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengembangkan program yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

(Jiston)

Dari Pengajar Menjadi Fasilitator Pembelajaran .....*Halaman 7*

bedaan kemampuan, kurangnya rasa percaya diri, dan kebiasaan menunggu arahan guru menjadi hal yang perlu diatasi melalui kesabaran, kreativitas, serta pendampingan secara bertahap.

Guru tetap memiliki peran penting dalam mengelola kelas, membimbing diskusi, memberikan arahan, dan memastikan seluruh siswa terlibat aktif. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan, diskusi antarguru, serta evaluasi pembelajaran juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari pengalaman tersebut, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur melalui nilai akademik, tetapi juga dari perkembangan keberanian, rasa ingin tahu, kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, dan kemandirian siswa.

Pada akhirnya, menjadi fasilitator berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuannya sendiri, dengan tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru.

Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga mendorong siswa agar berani bertanya, mampu berpikir, dan memiliki kemauan untuk terus belajar. Inilah semangat perubahan pembelajaran yang terus dibangun di SDN Turus 1 demi menciptakan pendidikan yang aktif, bermakna, dan berpihak pada kebutuhan peserta didik.

(Yan)

Rustandi Terpilih Jadi Ketua PWI Kabupaten Bandung .....*Halaman 7*

pola kerja jurnalistik serta cara masyarakat memperoleh informasi.

Karena itu, PWI Kabupaten Bandung perlu memperkuat kolaborasi, meningkatkan kompetensi anggota, dan menjaga kualitas organisasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

"Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik penyelenggara maupun rekan-rekan wartawan yang telah memberikan dukungan. Saya juga akan merangkul kedua calon yang belum terpilih dan mengajak mereka bekerja sama untuk memajukan PWI Kabupaten Bandung agar semakin maju dan berkualitas," ujar Rustandi.

Ia berharap kepengurusan periode 2026–2029 dapat menjadi momentum memperkuat persatuan anggota serta meningkatkan peran dan kontribusi PWI bagi dunia jurnalistik di Kabupaten Bandung.**(Hen)**

Bupati Maros Sambangi Atlet di Wajo, Kontingen Sudah Kantongi 41 Medali Emas



Bupati Maros Chaidir Syam bersama ketua KoKONI Maros dan beberapa Atlet. (Foto/Harjan)

Maros, Jaya Pos

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyambangi langsung para atlet Kontingen Kabupaten Maros yang tengah berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo, Rabu (11/11/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Maros tersebut untuk memberikan dukungan dan suntikan semangat kepada para atlet serta pelatih yang sedang berjuang mengharumkan nama daerah.

Chaidir mengatakan, dirinya baru berkesempatan menemui langsung para atlet pada hari ini karena saat pembukaan kegiatan belum sempat bertatap muka dengan seluruh kontingen.

Ia sekaligus ingin memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros senantiasa hadir dan memberikan dukungan kepada para atlet yang sedang bertanding.

"Saya ingin memberikan semangat kepada para pelatih dan atlet yang sementara berjuang. Pemerintah daerah berdiri bersama para atlet kita," ujarnya.

Chaidir mengaku terharu dan bangga melihat perjuangan para atlet yang selama ini menjalani latihan dengan tekun dan penuh semangat.

Menurutnya, hasil yang diraih saat ini merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses panjang yang telah dilalui para atlet bersama pelatih.

"Saya terharu dan bangga. Tidak menyangka apa yang selama ini kita usahakan dan kerjakan, melalui latihan yang tekun serta semangat yang tidak pernah lelah, bisa membuahkan hasil maksimal," katanya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Maros sebelumnya menargetkan 40 medali emas dengan asumsi mampu menembus posisi tiga besar klasemen Porprov Sulsel.

Namun, capaian sementara kontingen Maros telah melampaui target tersebut.

Berdasarkan laporan KONI Maros, hingga Rabu (11/11/2026), kontingen Maros telah mengoleksi 41 medali emas dan masih berpeluang menambah pundi-pundi medali. "Awalnya kami hanya menargetkan 40 medali emas. Namun, alhamdulillah, capaian tersebut sudah terlampaui dan kemungkinan masih bisa bertambah," ungkapnya.

Chaidir menjelaskan, terdapat sekitar 25 cabang olahraga (cabor) yang diproyeksikan mampu menyumbangkan medali emas.

Dari jumlah tersebut, terdapat 10 cabor unggulan yang menjadi andalan Maros, yakni panahan, kempo, atletik, tinju, bridge, akuatik, karate, yongmoodo, taekwondo, dan berkuda memanah.

Ia juga memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi atlet dan pelatih yang berhasil mengukir prestasi."Kami berikan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk seluruh atlet. Kami juga telah menyiapkan bonus bagi pelatih dan atlet yang meraih prestasi," jelasnya.

Sementara itu, KONI Maros menyebut target 40 medali emas sejak awal telah diperhitungkan secara realistis berdasarkan program pembinaan yang dijalankan.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengunjungi langsung venue latihan para atlet di Kabupaten Maros untuk memantau kesiapan dan perkembangan masing-masing cabang olahraga.

Capaian 41 medali emas tersebut menjadi hasil sementara dari program pembinaan yang telah dilaksanakan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, H. Suwardi Sawedi, SE., M.Si., turut menegaskan pentingnya menjaga semangat dan sportivitas seluruh atlet hingga pertandingan berakhir.

Ia mengajak para atlet untuk tetap fokus mengejar target dan memberikan kemampuan terbaik demi Kabupaten Maros.

"Tetap semangat, yakin pada tujuan dan junjung tinggi sportivitas. Mari kita doakan seluruh atlet kita yang sedang berjuang mempersembahkan prestasi untuk Kabupaten Maros," tutupnya.**(Hk)**

Penutupan TMMD Ke-130, Wabub Apresiasi Peranserta Semua Pihak Dengan Hasil Pekerjaan Yang Baik

Sukabumi, Jaya Pos

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, resmi berakhir. Penutupan digelar di Lapangan Bola Cikiara Kebun, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dihadiri Danrem 061/Suryakancana Bogor, Brigjen TNI Thomas Rajunio, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, Dandim 0622/ Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ari Wibowo, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, serta unsur Forkopimda dan Forkopimcam.

Danrem 061/Suryakancana Bogor, Brigjen TNI Thomas Rajunio mengatakan, seluruh sasaran fisik dan nonfisik TMMD telah selesai 100 persen. Bahkan, pembangunan jalan yang semula ditargetkan 2 kilometer bertambah menjadi 2,2 kilometer.

Selain jalan, TMMD juga membangun lima unit rumah tidak layak huni (Rutilahu), tiga MCK, lima sumur bor, fasilitas masjid, dan satu posyandu. Program ketahanan pangan dan penyuluhan masyarakat juga telah dilaksanakan.



Wakil Bupati Sukabumi H.Andreas bersama Kapolres Sukabumi AkIKBP Beny Cahyadi bersera Danrem Suryakecana Bogor Brigjen Thomas Rajunio. (Foto/ Ist)

Menurut Danrem, TMMD menjadi upaya mempercepat pembangunan hingga pelosok desa. Program ini juga membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh pembangunan.

Danrem berpesan agar seluruh hasil pembangunan dirawat dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan begitu, fasilitas tersebut bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas mengapresiasi TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat yang telah menyukseskan program TMMD. Seluruh pekerjaan dinilai selesai tepat waktu dengan hasil yang baik.

H Andreas mengatakan, keberhasilan TMMD tidak hanya terlihat dari pembangunan, tetapi juga kekompakan dan gotong royong masyarakat.

"Kita berharap program ini terus memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga desa,"pungkasnya.

Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Anjar Ari Wibowo menuturkan, bahwa sejumlah pembangunan berhasil direalisasikan, di antaranya pengaspalan jalan desa sepanjang 2.200 meter dengan lebar 2,5 meter, pembangunan lima unit sumur bor dan tiga gedung MCK, serta rehabilitasi lima rumah tidak layak huni (rutilahu).

"Selain itu, juga merehabilitasi satu gedung posyandu, satu jembatan, dan satu masjid. Program unggulan lainnya meliputi ketahanan pangan, penanganan stunting, serta penghijauan lahan," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima hasil TMMD ke-130 oleh Dandim dan Wakil Bupati, disaksikan Danrem. Dilanjutkan penyerahan paket sembako kepada lima warga dan mushaf Al-Qur'an oleh Danrem.

(Yudi)

DPRD Langkat Dorong Perbaikan Jalan Longsor di Desa Namoteras melalui Dana BTT

Langkat, Jaya Pos

DPRD Kabupaten Langkat mendorong percepatan penanganan jalan longsor di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, dengan mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini dibahas dalam audiensi Perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru dengan Ketua DPRD Kabupaten Langkat, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).

Longsor yang dipicu tingginya curah hujan tersebut mengancam akses transportasi masyarakat setempat. Jalan yang terdampak memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter.

Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, menyampaikan bahwa penanganan darurat perlu segera dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan semakin parah. Pasalnya, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah serta warga yang mengangkut hasil bumi.

"Sebelum jalan itu putus, kami berharap segera dilakukan perbaikan atau pembangunan tembok penahan sementara. Jika tidak segera ditangani, lima dusun akan terdampak, dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga," ujarnya.



DPRD Langkat dan Bupati Langkat tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS), (foto/ Humas DPRD Langkat)

Rahman menjelaskan, pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani bencana tersebut. Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta sehingga dinilai belum mencukupi untuk menangani kerusakan jalan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkoordinasi untuk mempercepat penanganan longsor melalui pemanfaatan dana BTT sesuai ketentuan.

Ia juga meminta perangkat daerah terkait segera mempersiapkan administrasi yang diperlukan agar proses penanganan dan perbaikan jalan di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, dapat segera ditindaklanjuti.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Ketua DPRD Kabupaten Langkat melalui koordinasi antar perangkat daerah.

(AN)

Diskoperindag Adakan Pelatihan Pasuruan Batik

Collaboration, Kolaborasi Pengrajin Untuk Ciptakan Produk Yang Berkualitas dan Unik



Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan Taufiqul Ghoni mewakili Bupati secara simbolis membuka acara Pelatihan dan Pameran Batik selama tiga hari (11-13- 2026). (Foto ist)

Pasuruan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Diskoperindag bersama Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar Pelatihan Membatik dan Pameran Batik dengan tema "Pasuruan Batik Collaboration" bertempat di Dome Pasuruan Creative Center (PCC) Bangkodir, Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil ,Rabu (11/11/2026).

Pelatihan ini diikuti oleh 50 pengrajin batik muda dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Para peserta sangat antusias akan adanya pelatihan tersebut. Banyak hal yang diajarkan dalam pelatihan ini. Tidak hanya mengajarkan tehnik batik tulis dan cap tapi juga kolaborasi motif khas Kabupaten Pasuruan dengan tren feshion modern.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan Taufiqul Ghoni mewakili Bupati secara simbolis membuka acara Pelatihan dan Pameran Batik selama tiga hari (11-13) selanjutnya.

"Dengan mengucap Bismillah Pelatihan dan Pameran Batik Kami Buka" katanya.

Taufiqul Ghoni juga menjelaskan mengapa tema Collaboration dipilih, alasannya motif batik di Kabupaten Pasuruan sangat unik dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Selain keunikannya yang khas Batik Pasuruan juga diharapkan dapat menembus pangsa pasar Nasional hingga Mancanegara serta dapat menarik minat para desainer pemuda untuk terus berkarya dan melestarikan budaya dengan berkolaborasi pada pengrajin tradisional.

" Batik Kabupaten Pasuruan harus naik kelas, selama ini motif batik Kabupaten Pasuruan dikenal sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain kita kolaborasi pengrajin tradisional dengan desainer muda milenial agar batik Kabupaten Pasuruan bisa tembus ke Fashion Nasional maupun internasional" ujarnya.

Selain itu Taufiqul juga berharap para peserta dapat mengkolaborasikan teknik penggunaan pewarna alami yang di hasilkan dari tumbuh tumbuhan. Sehingga menghasilkan batik yang unik yang tidak akan dimiliki oleh daerah lainnya.

Kolaborasi antara tua dan muda pengrajin yang sudah puluhan tahun membatik akan dikolaborasikan dengan desainer muda dari Pasuruan yang faham trend.

Hasil dari kerajinan batik yang telah dihasilkan pemasarannya tidak hanya dipamerkan saja ,tapi juga langsung dikoneksikan dan didistribusikan ke koperasi, marketplace dan dekranasda untuk dipasarkan secara Nasional.

" Hari ini dilatih besuk kita pamerkan, pameran ini untuk umum selama tiga hari" ungkapnya.

Beliau juga menghimbau untuk seluruh elemen pemerintahan masyarakat dapat membeli batik yang dihasilkan pengrajin

" saya minta semua pihak OPD , Camat,Kades beli batik khas Kabupaten Pasuruan" himbaunya.

(Wio)